



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH  
KOMISI VI DPR RI  
RAPAT KERJA DENGAN MENTERI INVESTASI/ KEPALA BADAN  
KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA**

- Tahun Sidang : 2024-2025  
Masa Persidangan : I  
Rapat Ke- : 8 (Delapan)  
Jenis Rapat : Rapat Kerja  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, Tanggal : Selasa, 03 September 2023  
Waktu : Pukul 14.21 s.d. 16.26 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPR RI  
Gedung Nusantara I Lt. 1  
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270
- Ketua Rapat : M. Sarmuji, S.E., M.Si.  
(Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/F-P.Golkar)
- Acara : 1. Pembahasan RKA KL Tahun Anggaran 2025  
(Pagu Anggaran);  
2. Pembahasan Realisasi Anggaran dan Investasi  
s.d Triwulan II TA 2024;  
3. Rencana Investasi Tahun 2025-2029; dan  
4. Lain-lain
- Sekretaris Rapat : Dewi Resmini, S.E., M.Si.  
(Kepala Bagian Sekretariat Komisi VI DPR RI)
- Hadir : **A. ANGGOTA DPR RI:**  
21 dari 54 orang Anggota dengan rincian:

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA  
PERJUANGAN (F- PDIP)**

5 dari 12 orang Anggota

1. Aria Bima
2. Adisatrya Suryo Sulisto
3. Dr. Evita Nursanty, M.Sc.
4. Sondang Tiar Debora Tampubolon, S.T.
5. Dr. Ir. Harris Turino, S.H., M.Si., M.M.

**2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA  
(F- PG)**

5 dari 8 orang Anggota

1. M. Sarmuji, S.E., M.Si.

2. Gde Sumarjaya Linggih, S.E., M.A.P.
3. Ir. H. Mohamad Idris Laena, M.H.
4. Doni Akbar, S.E., M.M.
5. Drs. H. Dadang S. Muchtar

**3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (F- P.GERINDRA)**

2 dari 7 orang Anggota

1. Mohamad Hekal, M.B.A.
2. Ir. H. La Tinro La Tunrung

**4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F- P.NASDEM)**

2 dari 6 orang Anggota

1. H. Rudi Hartono Bangun, S.E., M.A.P
2. H. Subardi, S.H., M.H.

**5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)**

0 dari 6 orang Anggota

-

**6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)**

3 dari 5 orang Anggota

1. Dr. Ir. H. E. Herman Khaeron, M.Si.
2. Hj. Melani Leimena Suharli
3. Dr. Edhie Baskoro Yudhoyono, B.Com., M.Sc.

**7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)**

1 dari 4 orang Anggota

1. Hj. Nevi Zuairina

**8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)**

3 dari 4 orang Anggota

1. Dr. H. Jon Erizal, S.E., M.B.A.
2. Abdul Hakim Bafagih
3. Eko Hendro Purnomo, S.Sos.

**9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)**

0 dari 2 orang Anggota

-

**B. PEMERINTAH/UNDANGAN:**

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (Rosan Perkasa Roeslani) beserta jajarannya

**JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Bisa kita mulai, Pak Menteri?

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Salam sejahtera untuk kita semua,  
Om Swastiastu,*

**Yang terhormat Pimpinan, dan  
Anggota Komisi VI DPR RI,  
Yang kami hormati dan selamat datang Menteri Investasi/Kepala BKPM RI, Bapak Rosan Perkasa Roeslani, beserta seluruh jajaran,**

Ini rapat Pak Menteri yang perdana, raker yang pertama ini.

Puji syukur marilah kita *haturkan* ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Taala*, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat-Nya, pada hari ini, kita bisa hadir dalam rapat kerja dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM RI dalam keadaan sehat walafiat.

Menurut laporan sekretariat, jumlah anggota yang menandatangani daftar hadir 12 orang, anggota izin 15 orang, jumlah fraksi 6 fraksi. Dengan demikian, sesuai dengan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan Pasal 276 ayat (1), maka perkenankan kami membuka rapat kerja kali ini dan saya nyatakan rapat ini terbuka untuk umum.

Setuju ya?

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.21 WIB)  
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)**

Terima kasih kami sampaikan kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM RI atas kesediaan waktunya menghadiri rapat kerja kita pada hari ini. Sesuai dengan undangan yang telah kami sampaikan, agenda rapat pada hari ini membahas mengenai:

1. Pembahasan RKA-K/L Tahun Anggaran 2025 atau Pagu Anggaran;
2. Pelaksanaan Realisasi Anggaran dan Investasi sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024;
3. Rencana Investasi Tahun 2025-2029.



Untuk itu kami juga ingin mendapatkan persetujuan dari anggota. Rapat ini bisa kita akhiri sampai pukul 16, ya?

Nanti kita lihat lagi.

**(RAPAT: SETUJU)**

Sebelum kita memulai acara ini, saya ingin mengajak kita semua untuk memanjatkan doa kepada rekan kita, Anggota Komisi VI yang wafat mendahului kita, yaitu Dato Drs. H. Nyat Kadir, Anggota DPR RI Fraksi Nasdem, pada hari Minggu, 1 September 2024, wafat di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta. Kita kirimkan doa, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai.

**(BERDOA BERSAMA)**

**Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, hadirin yang kami hormati,**

Berdasarkan Nota Keuangan peserta RAPBN Tahun Anggaran 2025, Pagu Anggaran Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2025 adalah sebesar Rp681.880.285.000,00 yang dialokasikan untuk program sebagai berikut:

- Penanaman Modal sebesar Rp322.394.354.000,00, dan
- Program Dukungan Manajemen sebesar Rp359.485.931.000,00.

Nilai tersebut sesuai dengan Pagu Indikatif Kementerian Investasi/Kepala BKPM yang telah dibahas pada rapat kerja tanggal 6 Juni 2024 yang lalu. Dapat kami sampaikan juga bahwa pada rapat kerja tersebut, Komisi VI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Investasi tahun 2025 sebesar Rp889.320.857.000,00 yang akan digunakan untuk Program Dukungan Manajemen dan Program Penanaman Modal.

Selain pembahasan RKA-K/L Tahun Anggaran 2025, pada rapat kerja kali ini, Komisi VI DPR RI juga ingin mengetahui realisasi anggaran dan investasi Kementerian Investasi/BKPM RI sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024, khususnya seberapa besar penyerapan anggaran tersebut dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Kementerian Investasi/Kepala BKPM.

Di samping pembahasan anggaran, Komisi VI DPR juga ingin mendapatkan penjelasan rencana investasi tahun 2025 sampai 2059 yang direncanakan untuk mendukung pembangunan di Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Pak Menteri untuk menyampaikan paparannya.

**MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (ROSAN PERKASA ROESLANI):**

Terima kasih, Pimpinan.



*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Shalom,  
Om Swastiastu,  
Namo Budhaya,  
Salam kebajikan,*

**Kepada yang terhormat Pimpinan/Ketua Komisi VI DPR RI,  
Kepada yang terhormat Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Anggota Dewan  
Komisi VI yang saya hormati,**

Pertama-tama sebelum kita mulai acara ini, izinkanlah kami atas nama Pimpinan dan seluruh pejabat Kementerian Investasi/BKPM menyampaikan rasa duka yang sangat mendalam atas meninggalnya Dato Drs. H. Nyat Kadir, Anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem, pada hari Minggu, 1 September 2024. Semoga almarhum ditempatkan di sisi mulia Allah *Subhanahu Wa Taala* dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran.

Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan syukur *alhamdulillah* kepada Allah *Subhanahu Wa Taala* karena kita semua masih diberikan kesehatan, kita semua masih diberikan umur panjang, dan karunia-Nya sehingga dapat bertemu dan berkumpul bersama dalam rangka rapat kerja bersama- sama dengan Komisi VI DPR RI.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan pada tanggal 19 Agustus 2024, kami ditunjuk sebagai Menteri Investasi dan Kepala BKPM yang sebelumnya dijabat oleh Bapak Bahlil Lahadalia, yang saat ini ditunjuk sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sedangkan untuk jabatan Wakil Menteri juga ini relatif baru, baru ditunjuk juga tanggal 18 Juli kemarin, 2024, yang saat ini dijabat oleh Bapak Yuliot.

Izinkan juga kami memperkenalkan, karena juga ada beberapa perubahan yang dilakukan sebelum saat, sebelum saya ditunjuk juga, sudah ada beberapa perubahan yang cukup banyak di posisi Eselon I. Izinkan saya mengenalkan juga, Bapak-Ibu Anggota Dewan yang terhormat:

1. Sekretaris Kementerian Investasi atau Sekretaris Utama BKPM dijabat oleh Bapak Hedy Satria Putera. Pak Hedy, ya; kemudian
2. Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal dijabat oleh Bapak Dedi Latip;
3. Deputy Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal dijabat oleh Bapak Riyatno;
4. Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal dijabat oleh Bapak Tirta Nugraha Mursitama, sedang berada di Bali, sedang bertugas; dan juga
5. Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal dijabat oleh Bapak Iwan Suryana;
6. Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dijabat oleh Bapak Edy Junaidi; dan yang terakhir



7. Deputi Bidang Teknologi Informasi dijabat oleh Bapak Ricky Kusmayadi.

**Bapak-Ibu Anggota Komisi VI yang terhormat,**

Kami menyadari bahwa memang masa jabatan Kabinet Indonesia Maju ini akan berakhir pada bulan Oktober. Sehingga mohon kiranya kami tetap mendapatkan dukungan yang penuh dari seluruh Pimpinan dan juga Anggota Komisi VI untuk mendukung program-program dan juga kegiatan pada masa waktu yang memang tidak lama ini.

Sesuai dengan agenda rapat kerja pada hari ini, perkenankan kami menyampaikan data yang terkait, dan:

1. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Investasi/BKPM Tahun Anggaran 2025 (Pagu Anggaran); kemudian juga
2. Realisasi Anggaran Tahun 2024 dan Realisasi Investasi sampai dengan Semester I Tahun 2024;
3. *Prognosa* Target Realisasi Investasi 2025-2029; dan
4. Perkembangan Layanan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS.

Selanjutnya, izinkanlah kami menyampaikan penjelasan sebagai berikut.

**Bapak dan Ibu Anggota Dewan yang terhormat,**

Sebagaimana telah disampaikan oleh Menteri Investasi dan Kepala BKPM pada rapat kerja sebelumnya pada tanggal 11 Juni 2024, yang menyampaikan bahwa sesuai Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas terkait Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2025, adapun anggaran yang diberikan kepada Kementerian Investasi/BKPM adalah sebesar 681,88 miliar dari rencana kebutuhan anggaran sebesar 1,57 triliun atau kurang lebih hanya 43,39% dari kebutuhan pembiayaan. Sementara apabila kita bandingkan dengan alokasi anggaran 2024 yang di mana adalah 1,23 triliun, terdapat penurunan anggaran kurang lebih 44,5%. Jadi, mengalami penurunan yang cukup sangat signifikan.

Sedangkan kalau kita lihat ini adalah *breakdown*-nya secara terperinci. Mungkin saya tidak bacakan satu satu, tetapi itulah angka yang saat ini disetujui sebesar 681,88 miliar. Layarnya *aja*, Ibu. Layarnya, Ibu, *gitu*, 44,53%. Bukan, dari tahun sekarang, tahun 2024 ke 2025, penurunannya 44,53%. Kalau kebutuhan anggaran yang kami *mintakan* dibandingkan dengan yang di, yang disetujui hanya 43,39%. Jadi, ini berbanding terbalik, nanti mungkin saya bahas dengan target yang memang meningkat pada tahun 2025 ini.

Karena kalau kita lihat dari Pagu Anggaran 2025 tersebut, ya, kegiatan ini yang bisa kita lakukan untuk kegiatan rutin seperti belanja gaji, kemudian belanja operasional kantor. Sedangkan untuk mencapai target realisasi investasi ini, pembiayaan pada unit Eselon I yang terdiri dari, apa, Kedeputan Perencanaan, hilirisasi, pengembangan, promosi, kerja sama,



pelayanan, pengadaan pelaksanaan, teknologi informasi yang di mana untuk penyempurnaan OSS, dan kesekretariatan akan, apa, akan tidak akan berjalan dengan efektif.

Berdasarkan uraian kegiatan pada Eselon I di atas, karena tidak didukung oleh anggaran yang cukup, hanya tersedia untuk kegiatan rutin, maka ini menimbulkan konsekuensi. Tentunya terbatasnya pembiayaan untuk kegiatan peningkatan konsolidasi perencanaan, hilirisasi, dan promosi penanaman modal masuk ini akan berpengaruh kepada sembilan IPC kita yang berada di luar negeri, keberadaannya, karena ini akan menjadikan tidak efektif dan tidak efisien, bahkan bisa terjadi kita untuk *me-review* ulang keberadaan dari IPC yang berada di sembilan negara ini.

Kemudian, tentunya ini juga akan mengakibatkan tidak tercapainya pertumbuhan perekonomian yang disebabkan oleh rendahnya realisasi investasi. Karena berdasarkan rancangan awal rencana kerja pemerintah 2025, target realisasi investasi dicanangkan sebesar 1,905 triliun, menjadi akan sangat sulit dicapai. Jadi, mengalami peningkatan dari 1,650 menjadi 1,905 triliun. Dan tentunya ini akan berdampak kepada penciptaan lapangan pekerjaan, penurunan pelayanan kepada pelaku usaha, dan yang lain-lain.

#### **Bapak dan Ibu Anggota Dewan yang terhormat,**

Dapat kami sampaikan alokasi anggaran Kementerian Investasi/BKPM pada tahun 2024 sebesar 1,23 triliun, terdapat blokir anggaran sebesar 60 miliar. Sampai dengan 31 Agustus 2024, adapun yang telah direalisasikan sebesar 754,54 miliar atau 64,53%, itu sudah direalisasikan dari total anggaran tahun ini setelah blokir sebesar 1,17 triliun. Capaian realisasi anggaran tersebut terdiri dari Program Dukungan Manajemen sebesar 289,95 miliar dan Program Penanaman Modal sebesar 464,58 miliar. Selamat datang, Pimpinan.

Sisa anggaran yang dapat kami realisasikan hingga akhir 2024 adalah sebesar 414,7 miliar atau kurang lebih 35,47%. Sampai dengan akhir tahun 2024, kami tentunya akan mengoptimalkan penyerapan anggaran pada setiap unit di eselon kami. Dan ini adalah *breakdown* dari jumlah realisasi anggaran di setiap deputi dan juga di sesmen, sehingga kurang lebih tadi sudah saya sampaikan, penyerapan anggaran kurang, kurang lebih mencapai 64,53%.

#### **Bapak dan Ibu Anggota Dewan yang terhormat,**

Hingga Semester I 2024, telah tercapai realisasi investasi sebesar 829,9 miliar, *eh sorry*, triliun, 829,9 triliun. Apabila dibandingkan dengan target rencana strategis yang pertama sebesar 1,239 miliar, 1.239 miliar atau capaian 67% dari target pada saat-saat sekarang. Tetapi kalau mengacu kepada pertumbuhan perekonomian tahun 2024, yang di mana Bapak Presiden menetapkan target tambahan menjadi 1.650 triliun, sehingga target yang tercapai pada Semester I 2024 adalah 50,3%.



Realisasi investasi tersebut tentunya cukup merata antara Jawa dan luar Jawa, yaitu di Jawa kurang lebih 50,2% berbanding dengan 49,8%. Dan juga komposisi dari penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri cukup seimbang, yaitu modal asing kurang lebih 50,8% dan modal dalam negeri adalah 49,2%. Dan yang paling penting, ini juga penyerapan tenaga kerja pada Semester I 2024, hasil dari realisasi investasi, menyerap 1.225.042 orang tenaga kerja Indonesia. Itu adalah penyerapan dari segi tenaga kerja.

Kemudian,

**Pimpinan, dan  
Anggota Komisi VI yang kami hormati,**

Untuk menunjang target pertumbuhan perekonomian yang ditetapkan oleh presiden terpilih, Kementerian Investasi/BKPM telah berkoordinasi juga dengan Bappenas, untuk membuat *prognosa* realisasi investasi periode 2025-2029. *Prognosa* tersebut terlihat pada angka-angka di bawah ini. Ini adalah angka pertumbuhan yang dikeluarkan oleh Bappenas. Kami mengikuti angka pertumbuhan ini, sehingga tahun 2025 ini memang yang sudah masuk RKP, target dari investasi adalah 1.900 triliun, dan kemudian meningkat secara gradual secara tiap tahunnya, sehingga pada tahun 2029 diharapkan angkanya menjadi 2.793 triliun. Jadi total investasi yang diharapkan pada akhir tahun 2029, baik yang PMA maupun PMDN. Yang PMA adalah 11.674 triliun, yang PMDN adalah 11.855,5 triliun.

Tentunya untuk mencapai target realisasi antara 2025 dan 2029, dibutuhkan beberapa hal, salah satunya adalah:

1. Kembali lagi ketersediaan anggaran yang cukup untuk melaksanakan seluruh kegiatan di Kementerian Investasi dan BKPM; kemudian
2. Konflik diharapkan akan makin membaik, baik di Timur Tengah maupun perang antara Rusia dan Ukraine; dan kemudian
3. Kami juga akan fokus dalam mengejar investasi di sektor *green investment*, infrastruktur konektivitas, transisi energi, hilirisasi, dan juga investasi yang berbasis ekspor;
4. Investasi prioritas juga di bidang ketahanan pangan dan ketahanan energi yang berkelanjutan dan berkesinambungan; dan
5. Ini yang juga penting adalah peningkatan secara terus-menerus pelayanan berusaha melalui OSS atau *Online Single Submission*; dan satunya lagi
6. Dibutuhkan adanya alokasi dana, alokasi khusus DAK non-fisik yang akan digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk fasilitasi realisasi penanaman modal di daerah.

Dapat kami laporkan, layanan OSS berbasis risiko dari 4 Agustus 2021 sampai 31 Agustus 2024 telah menerbitkan Nomor Induk Berusaha atau NIB





sebanyak 10.135.597 NIB (Nomor Induk Berusaha), dengan rata-rata layanan per hari sebanyak 9.250 NIB per hari. Data layanan tersebut tertera juga pada daftar di bawah ini. Ini adalah daftar dan juga sebaran dari NIB yang kami terbitkan selama ini, selama kurang lebih 13 tahun.

Demikian penjelasan dan paparan kami. Tentunya kami mohon selalu dukungan dari seluruh Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, Komisi VI, untuk dapat memperjuangkan penambahan anggaran tahun 2025, mengingat memang target meningkat. Tentunya harapannya anggaran kami juga meningkat, karena peningkatan target juga cukup signifikan. Oleh sebab itu, kembali lagi tentunya, mohon *support* dan juga dukungan dari Bapak-Ibu di Komisi VI.

Atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih dari Anggota Dewan yang terhormat.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Om Santi, Santi, Santi, Om,

**KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

*Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,*

Terima kasih, Pak Menteri, atas paparannya. Menyeluruh meskipun singkat, menggambarkan keseluruhan yang dibutuhkan dalam rapat pada hari ini.

Selanjutnya kami persilakan kepada Anggota untuk melakukan pendalaman. Ada sepuluh orang yang akan mendalami, sisanya ingin berkenalan karena baru.

Bu Evita dulu, kami persilakan. *Ladies first.*

**F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):**

*Ladies first, ya.*

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

**Bapak Menteri dan jajaran yang saya hormati,**

Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat, Pak Menteri, atas kepercayaan diberikan untuk menjabat sebagai Menteri Investasi dan Kepala BKPM. Saya yakin dengan latar belakang yang Pak Menteri miliki, terakhir wakil BUMN, Menteri BUMN, Duta Besar, ya *kan*, Ketua Kadin, Ketua Pemenangan. Saya yakin Pak Menteri bisa memahami kendala-kendala investasi yang kita hadapi saat ini, Pak Menteri. Bagaimana ke depan kita bisa mengoptimalkan investasi kita dan sekaligus kita bisa meraih investasi yang berkualitas.



Dari apa yang Bapak sampaikan tadi, saya ada beberapa catatan, Pak. Untuk halaman 4, Bapak bicara mengenai konsekuensi Pagu Anggaran 2025. Memang saya melihatnya juga ikut prihatin ya, Pak Menteri, ya. Target investasi naiknya begitu besar, tapi anggarannya, pemotongan anggaran itu cukup besar juga, Pak Menteri.

Nah, dan saya melihat, kalau saya baca tadi presentasi Pak Menteri, Pak Menteri sudah *ngancem nih*, ya *kan*. "Kalau *gua* turun ini anggaran *gua*, pokoknya sembilan kantor perwakilan ditutup". Nah, tadi apa tuh saya catat. Kemudian, pelayanan ke pelaku usaha akan turun, target pertumbuhan ekonomi tidak akan tercapai. Tapi tentunya saya yakin, apa pun nanti keputusan dari anggaran ini, Pak Menteri pasti akan bisa mencari solusi yang terbaik.

Halaman 7 juga Bapak menyebutkan, ya *kan*, bahwa realisasi investasi Semester I. Ini juga, Pak, hanya yang menjadi pertanyaan saya, satu. Di tengah-tengah maraknya informasi, bahwa banyak pengangguran di Indonesia saat ini, ya *kan*, Pak, ya? Tetapi Bapak mengatakan tadi, bahwa investasi yang dimiliki saat ini, itu menyerap tenaga kerja 1.225.000 *bla bla* orang tadi, Pak. Nah, ini angka dari mana? Apakah ini angka hitung sendiri? Apakah angka ini laporan dari investor waktu mereka minta izin usaha? Apakah dari Menteri Tenaga Kerja? Ini saya juga ingin, atau apakah langsung cek ke lapangan? Hal ini yang saya ingin mendapat penjelasan dari Pak Menteri. Dapat angka 1,2 itu dari mana *gitu*, Pak Menteri?

Terus ke depannya, saya juga ingin tahu dari Pak Menteri sebenarnya, kita ini harus fokus di sektor mana *sih* investasi kita ini sebenarnya, Pak? Karena kalau kita *enggak* fokus, ya begini-begini saja, *gitu*, Pak, serabut sana-sini, pokoknya sedikit-sedikit, *gitu*. Fokus di mana, sehingga yang tadi saya sampaikan bahwa kita di industri manufaktur kita, banyak PHK, *kan* begitu, Pak? Banyak yang tutup. Nah, ke depan ini kira-kira ini kita mau fokus di mana *sih*, Pak?

*Next* pertanyaan saya, saya bacakan, Pak. Berbagai negara saat ini *nih*, Pak Menteri, tengah bersiap menetapkan kesepakatan pajak minimum, *Global Minimum Tax*. Sudah dari tahun 2021, sudah 136 negara yang setuju. Uni Eropa sudah setuju, Amerika sedang mendalami. Bagaimana sikap Indonesia ke depan, Pak? Karena kita tahu, ada perbedaan pendapat antara Menkeu dan Pak Bahlil, Pak. Pak Bahlil menolak mengenai ini. Nah, Menurut Bapak, ini sepertinya bagaimana sikap kita ke depan untuk yang namanya *global minimum tax* ini? Karena ya *gak tau* ya, Pak, kalau dari sektor investasi kita terus-terang saja kita ini kecewa. Banyak investor-investor kita yang lari ke Malaysia saat ini ya, Pak, ya. Lebih memilih Malaysia, kenapa? *Kan* begitu pertanyaan kita, Pak. Google pilih Malaysia *invest* 32T, Elon Musk, kemudian apa, Tesla, Microsoft, Apple, semuanya ke Malaysia. *What is wrong with our country?* *Kan gitu* pertanyaannya, Pak.

Apa yang mereka miliki yang tidak kita miliki? Katanya *nih*, mereka itu di Malaysia itu mempergunakan teknologi yang ramah lingkungan. *Emangnya*



kita *nggak* bisa? *Kan* begitu, Pak. Kita sudah coba *tuh* di Kalimantan ada *Green*, apa namanya, *Green Park* ya, Pak, ya? Ya kan. Tapi sekarang saya *nggak* dengar itu, apa sih kelanjutannya dari itu. Investor mana *sih* yang masuk membuka pabriknya di situ? Itu juga *nggak* ada. Jadi, menurut saya, ya bagi saya *sih* menjengkelkan, Pak, ya. Maksudnya mereka investasi di Malaysia, tapi Indonesia ini adalah target *market* mereka. Kita hanya diberikan untuk *market* segmennya mereka, untuk jualan *aja* di negara kita, tetapi mereka investasinya di negara lain. Ada yang salah.

Nah, ini saya rasa, ini yang harus dipikirkan oleh Kementerian Investasi, bagaimana kita menarik investasi-investasi itu ke, apa namanya, ke Indonesia. Dan tentunya saya berharap di tangan Pak Menteri ini, Kementerian Investasi ini akan semakin baik ya, Pak Menteri, ya. Kemudian, saya harap Pak Menteri ini kerjanya, kerjanya di dunia nyata, Pak. Sekarang ini banyak sekali Menteri itu kerja di dunia maya. Saya minta Pak Menteri bekerja di dunia nyata, yang benar-benar tidak, apa namanya, *omon-omon* saja, *gitu loh*, Pak, ya *kan*. Tapi memang kenyataan ini menghasilkan, *gitu loh*, Pak. Saya rasa demikian.

Satu lagi, mengenai OSS. Dari saya masuk sampai periode lima tahun saya selesai, OSS ini tidak pernah beres-beres dan menghabiskan duit yang begitu besar. Saya juga mau tanya sama Pak Menteri, dengan jebolnya PDNS kita kemarin, apa hubungannya? Ada kaitannya *enggak* dengan OSS kita, Pak? Saya rasa demikian, Bapak Pimpinan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Terima kasih, Ibu Evita.

Selanjutnya, sebelah kanan, Pak Subardi. *Ngarso Luar Ngayogyakarta*.

**F-P.NASDEM (H. SUBARDI, S.H., M.H.):**

Baik.

Terima kasih, Pimpinan.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Yang saya hormati Pimpinan, dan  
Segenap Anggota DPR RI Komisi VI,  
Pak Menteri Investasi dan BKPM beserta jajarannya lengkap,  
Selamat datang, Pak Menteri, di Komisi VI,**

Merupakan wajah baru di akhir masa periode ini. Mudah-mudahan punya berkah buat bangsa dan negara.



**Pak Menteri,**

Saya ingin mendalami ataupun menyampaikan soal anggaran yang menurut saya sangat-sangat apa ya, luar biasa. Artinya luar biasa, kalau boleh dikatakan, *motongnya* luar biasa. Jadi, hampir separuh, hampir 50% pemangkasan anggaran dari Kementerian Investasi dari tahun yang sebelumnya. Angka yang pantas di sini tentunya kita ataupun Pak Menteri dengan jajarannya, akan berpikir yang sungguh sangat-sangat ketat, sehingga uang sejumlah itu harus *diapain*.

Dari paparan, Pak Menteri mengusulkan adanya tambahan anggaran yang jumlahnya juga hampir mirip dengan jumlah untuk mencukupi jumlah anggaran yang tahun 2024 yang lalu. Kalau itu ada anggaran, *no problem*, jalan. Tetapi ketika tidak ada anggaran, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dijalankan? Sehingga saya ingin menanyakan, yang pertama tentunya *cost* untuk biaya operasional berkaitan dengan gaji dan sebagainya, rutinlah, itu mesti harus tercukupi. Di luar itu atau selebihnya itu, akan menjadikan prioritas apa agar fungsi daripada kepentingan ...

**KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Pak Bardi, *mic*-nya diturunkan *dikit*.

**F-P.NASDEM (H. SUBARDI, S.H., M.H.):**

Yang naik itu *mic*-nya bukan, bawahnya sudah *gak* naik.

Sehingga apa? Yang ingin saya sampaikan adalah ketika rutin ataupun gaji dan *cost* kantor sudah tercukupi, artinya kehidupan daripada pejabat dan karyawan itu tercukupi. Tetapi apakah kita hanya akan makan gaji tapi *nggak* kerja? Nah, oleh karena itu, sekali lagi saya sampaikan bahwa saya ingin tanyakan, prioritas apa yang akan diberikan, akan dijalankan, agar fungsi daripada Kementerian Investasi dan BKPM itu masih ada.

Kalau saya bicara optimal, omong kosong *lah* dengan jumlah anggaran. Tapi paling tidak, minimum, Kementerian Investasi dan BKPM itu masih ada fungsinya. Dengan fungsi Kementerian Investasi dan BKPM itu ada, maka pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, paling tidak masih bisa dipertahankan. Tidak ada penurunan yang tajam. Nah, oleh karena itu, apakah deputi, apakah program apa yang itu masih harus dipertahankan. Itu yang pertama.

Nah, berikutnya, kalau kita melihat apa yang dipaparkan oleh Pak Menteri, bahwa anggaran tahun 2024 sampai hari ini sudah terserap sekitar 65%, sehingga masih ada sisa anggaran yang belum terserap, 35%. Perkiraan atau asumsi kira-kira masih tersisa berapa atau dihabiskan berapa dari 35% ini?



Nah, ini tentunya menjadi pertimbangan Kementerian Keuangan untuk bisa dimasukkan, untuk sebagai penambahan anggaran 2025 yang akan datang, tentunya begitu. Tetapi kalau itu harus atau sudah bisa terprediksi bisa habis, nah, tentunya usulan pagu tambahan yang jumlahnya 680 itu memang harus ada.

Tetapi kalau tidak tersedia sekian, mungkin saya usulkan kepada forum ini, khususnya kepada Kementerian Investasi dan BKPM, idealnya berapa? Asalkan masih bisa seperti tadi. Kalau tadi *kan* uang yang ada *dijalanin*. Tapi paling tidak, fungsi-fungsi yang memang itu penting, seperti tadi disampaikan Bu Evita di depan, bahwa kantor-kantor yang ada di perwakilan di ada luar negeri, tetap berjalan. Nah, ini harus berapa? Apakah dari 681, oh cukup 400, cukup 300. Nah, ini mohon ada satu perincian yang detail, sehingga kita punya argumen di dalam memberikan rekomendasi agar Kementerian Keuangan atau Keuangan Negara bisa memberikan fasilitas kepada, eh fasilitas tambahan anggaran kepada Kementerian Investasi dan BKPM. Itu yang pertama soal anggaran.

Soal OSS. Sama *sih* OSS tapi mungkin beda *case*. OSS ini sebenarnya kalau kita lihat dari kuantitatifnya, luar biasa dalam masyarakat banyak. Kemudahan berusaha, kemudahan perizinan, luar biasa. Tetapi saya menjumpai hal-hal yang memang ada kontradiksi dengan daerah.

Seperti rapat yang terdahulu, mungkin Pak Sekretaris Utama maupun dari Deputi masih ingat waktu saya dengan Bahlil, bahwa ada satu wilayah atau daerah dalam pengajuan OSS, pengeluaran izin melalui OSS itu ada kontradiktif. Contoh konkret, di satu daerah, saya dari Jogja, Pak, daerah. Mereka itu di dalam membuat perda, toko-toko modern, itu di plafon ataupun di, apa istilahnya, bukan di plafon, di kuota. Satu kabupaten kuotanya maksimalnya 50. Sehabis 50 *nggak* boleh. *Nggak* boleh. Nah, kemudian, *tapi* dia tidak tutup mata. Boleh, asal ada kerja sama dengan pihak lokal, artinya dengan pengusaha di luar mereka. Istilahnya *reguler* dan *franchise*, istilahnya begitu. Tetapi dalam realisasi, yang namanya manusia, ya *toh*, kuota daripada regulernya sudah habis, tapi dengan kelalaian atau kesengajaan, maka OSS bisa keluar karena ada rekomendasi daripada pemerintah daerah, padahal itu melanggar perda.

Nah, saya ingin menyampaikan kepada kementerian, bagaimana mengatasi lapangan seperti ini, agar apa? Ada sinkron. Satu, tidak melanggar perda, tetapi juga, apa namanya, artinya tidak melanggar perda. Perda yang dibikin oleh semua daerah yang masing-masing itu punya kepentingan masing-masing, itu disinkronkan. Sehingga tidak ada pelanggaran-pelanggaran dari para petugas di dalam menjalankan fungsi OSS. Ya, kalau ya merekomendasi diam-diam atau apa. Karena sebenarnya dengan OSS itu, saya katakan tadi, itu luar biasa.

Nah, pertimbangannya adalah satu sisi investasi itu penting, apakah toko atau apa, tapi yang ada batas-batasan itu memberikan satu, apa,



persaingan yang kurang sehat di bawah. Artinya monopoli investasi ada di pemegang saham ataupun pemilik modal tinggi dengan UMKM, dengan usaha menengah, dan sebagainya, mereka akan tergerus.

Nah, ketika ada sinkronisasi antara Kementerian Investasi dan BKPM dengan pemerintah daerah, di dalam menelurkan atau membentuk perda-perda, maka itu akan bisa sinergi. Tetapi ketika tidak ada pengawasan, tidak ada evaluasi, tidak ada pemantauan, maka akan terjadi, ya itu tadi akan pelanggaran-pelanggaran yang notabene ketika itu pelanggaran dan itu menjadikan suatu pelanggaran yang indisipliner, maka akan masuk ke ranah hukum. Oleh karena itu, mohon nanti ada penjelasan sesuai mana mengatasi hal-hal tersebut di belakang hari.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

*Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,*

Terima kasih, Pak Bardi.

Selanjutnya, Ibu Nevi Zuairina.

**F-PKS (Hj. NEVI ZUAIRINA):**

Terima kasih.

**Pimpinan, dan  
Anggota Komisi VI yang kami hormati,  
Pak Menteri bersama jajaran,**

**Pak Menteri,**

Selamat atas pelantikan sebagai Menteri Investasi dan tentu ini amanah walaupun hanya sebulan, Pak Menteri. Semangat menyelesaikan masalah investasi di Indonesia.

Yang pertama, Pak Menteri, konflik global dan konsultasi ekonomi Amerika-Cina ternyata sangat mempengaruhi capaian target investasi kita di tahun 2025. Situasi ini tidak ada yang bisa memastikan kapan kondusifnya, sehingga kita dipaksa harus mencari program dan rencana alternatif. Tolong sampaikan, Pak Menteri, dari Pak Menteri dalam menyikapi situasi global ini. Artinya ke depan, Pak Menteri, dengan anggaran yang tadi sudah Pak Menteri sampaikan, tetap harus ada *plan B*-nya ketika menghadapi situasi global tersebut.



Lalu yang kedua, Pak Menteri, beberapa tahun terakhir ini kami melihat investasinya sepertinya salah arah. Proyek investasi dibangun pemerintah justru mengarah kepada sektor padat modal, bukan padat karya. Kita lihat, Pak Menteri, realisasi investasi masuk ke Indonesia itu banyak di padat modal seperti tambang batu bara, tambang nikel, perkebunan sawit, kopi, kakao, dan *smelter* yang menghabiskan biaya hingga ratusan miliar rupiah. Padahal sektor-sektor tersebut hanya dinikmati segelintir orang, dan hanya memberikan kontribusi pemenuhan ekonomi nasional sebesar 20%. Dan sedangkan para pemilik modal atau pemilik tambang hingga perkebunan sawit, kontribusinya bagi pemenuhan ekonomi sebesar 10%. Para pemilik modal ini, pemilik uang banyak yang kita yakin dan percaya pasti juga akan membelanjakan uangnya di luar negeri.

Nah, ini padat modal, bukan padat karya. Tapi bila investasinya diutamakan sektor padat karya, maka daya beli masyarakat akan meningkat. Rakyat kecil dan kelompok menengah membelanjakan barang kebutuhannya di dalam negeri, geliat ekonomi tumbuh, dan kita mendapatkan *multiplier effect* yang besar.

Jadi, Pak Menteri yang kami ingin tanyakan, mohon Pak Menteri mengklarifikasi dan menjelaskan realisasi investasi selama 3-4 tahun terakhir ini, berapa untuk industri padat karya dan berapa untuk industri padat modal, serta di jenis industri apa saja? Bagaimana *multiplier effect*-nya? Apakah signifikan meningkatkan *growth* secara nasional? Itu yang kedua, Pak Menteri.

Yang ketiga, untuk masalah kemudahan layanan perizinan. Dengan Pak Rosan menjadi Menteri Investasi yang baru, kami mengharapkan keberanian Pak Menteri membuat Peraturan Menteri yang, yang membuka keran seluas-luasnya investasi, semudah-mudahnya, seperti negara tetangga kita. Investasi banyak di Malaysia, Vietnam, kita harus belajar dari mereka, kenapa investasi banyak di sana. Nah, ini kami mengharapkan secara teknis lewat Peraturan Menteri, ada instrumen kewenangan yang Bapak bisa lakukan, sehingga investasi banyak akan kembali ke Indonesia.

Lalu terakhir, Pak Menteri, ada 10 juta data, Pak. Sepuluh juta data ini, Pak, apakah betul-betul mereka itu hanya data saja? Terus apakah berjalan usahanya? Apakah ada pendampingan atau insentif khusus? Itu saja, Pak Menteri.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Terima kasih, Bu Nevi.

Selanjutnya, yang tiap hari pakai safari, Pak Harris Turino.

**F-PDIP (Dr. Ir. HARRIS TURINO, S.H., M.Si., M.M.):**





Terima kasih, Pimpinan.

**Yang terhormat Pimpinan, dan  
Rekan-rekan Anggota Komisi VI,  
Yang terhormat Pak Menteri Investasi Kepala BKPM,  
Pak Wamen beserta seluruh sejarahnya,**

Selamat dulu, Pak. Dulu Bapak duduk di situ sebagai Wamen BUMN, sekarang Wa-nya sudah hilang, Pak. Benar-benar Menteri, Pak, jadi Men, ya. Ya, duduk, Bapak duduk di sebelah, tapi setelah Bapak sukses lewat ujian, yaitu tim pemenangan, kelihatannya mendapatkan *reward* yang pertama, Pak.

Kementerian yang luar biasa, walaupun sialnya adalah anggarannya dipotong sebesar 44,5%, dari 1,2 triliun menjadi hanya 681 miliar. Nah, penurunan anggaran sebesar 44,5% ini, apakah kemudian Bapak akan melakukan *adjustment* di target, Pak? Karena target dari presiden jelas, untuk 2025 adalah sebesar 1.800 triliun.

Apakah akan kompromi di target atau tidak? Karena di dalam rapat sebelumnya dengan Menteri Bahlil, Ketuanya Pak Sekjen Sarmuji, saat itu saya juga minta komitmen, bahwa walaupun anggarannya dipotong, tetapi targetnya tetap dipasang di 1.800 triliun. Kenapa? Karena memang besaran investasi yang masuk ke suatu negara tidak sepenuhnya linier dengan besaran anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian Investasi dan Kepala BKPM.

Satu contoh saja, seandainya kementerian ini dibubarkan, berarti anggarannya nol, maka tetap pasti masih banyak investasi asing yang masuk ke Indonesia, sehingga hubungannya tidak linier. Saya yakin dengan pengalaman Pak Rosan yang sudah melalang buana, apalagi punya *network* yang sangat kuat dengan Gedung Putih, rasanya itu angka yang masih masuk akal untuk dicapai, ya.

Tetapi, Pak, kita tahu kondisi eksternal. Kondisi eksternal dinamika ekonomi, dan politik global masih sangat tidak tentu.

- Dari sisi ekonomi, terutama perang dagang China dan Amerika;
- Dari sisi politik, perang Rusia dan Ukraina; kemudian
- Kondisi di Timur Tengah; serta
- Tentu saja inflasi yang masih mengancam di belahan bumi utara, baik di Amerika maupun di Eropa.

Di tengah kondisi yang seperti ini, apakah ini menjadi satu peluang atau menjadi satu tantangan yang menghambat masuknya investasi ke Indonesia? Karena kita tahu banyak investasi keluar dari Tiongkok, tidak lari ke Indonesia, Pak. Mereka kebanyakan lari ke Vietnam, mereka banyak lari ke Malaysia, banyak lari ke Kamboja.

Sehingga, yang menjadi pertanyaan adalah apa yang salah dengan negara ini? Kenapa selama ini Kementerian Investasi tidak mengambil langkah-langkah inisiatif untuk, katakan, jemput bola, sehingga yang investasi di sini, katakan Tesla, itu membangun pabrik mobilnya atau minimal membangun baterainya. Ternyata yang masuk adalah Starlink-nya. Ini *kan* tentu sangat miris, Pak. Investasinya, kalau tidak salah dulu 3 miliar dengan 3 orang karyawan, Pak. Ketika itu kita tanyakan juga kepada Menteri Investasi, ternyata Menteri Investasi saat itu tidak tahu. Ini *kan* jadi hal yang menarik.

Kemudian, untuk *slide* Bapak yang di halaman 8, Pak. Ini adalah *slide* revisi, Pak, dan saya rasa setelah direvisi juga masih keliru, ya. Di halaman 8, Bapak katakan bahwa target realisasi PMA dan PMDN itu tadi Bapak jelaskan PMA-nya 1.800, PMDN-nya 1.900. Apakah benar 2025 akan ada 3.700 triliun yang masuk ke Indonesia? Rasanya ini salah datanya, Pak, ini rasanya salah.

Di *slide* sebelumnya yang Bapak kirimkan, itu *kan* ada logika berpikirnya mulai dari GDP, kemudian asumsi kenaikan GDP, sehingga ada kenaikan GDP per tahun, kemudian dari situ Bapak juga memunculkan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang merupakan persentase dari GDP. Dari situ kemudian Bapak turunkan angka komponen PMA dan PMDN sebagai bagian dari PMTB di *slide* sebelumnya. Nah, saya sendiri mau mempertanyakan logika itu. Sementara diperbaiki dan *slide*-nya menjadi lebih keliru lagi, karena tidak mungkin tahun depan ada investasi 3.700 triliun, ya.

Kemudian yang kedua, masih di *slide* 8, Pak. Ini angka 2026 sebesar 2.119 triliun, tahun 2027 2.343,8 triliun. Ini yang saya ambil samping kirinya saja, yang tadi Bapak anggap sebagai PMA. Ini angka turun dari mana? Karena rasanya presiden yang baru belum menetapkan berapa besaran target investasi yang ada.

Kemudian, mengenai pertumbuhan GDP-nya. Ini juga asumsinya menggunakan asumsi siapa? Sehingga bisa memasang angka 5,6%, sementara RAPBN yang di pagunya dibicarakan oleh Menteri Keuangan, pertumbuhannya tidak sama dengan 5,6%. Ini menjadi satu catatan, apalagi kalau kita melihat investasi di Indonesia masih dihantui oleh banyak "*the same old story*," Pak, seperti kepastian hukum yang sangat rendah. Hukum bisa berubah-ubah sesuai dengan keinginan penguasa.

Ekonomi biaya tinggi. Ini saya rasa semua mengakui, di Indonesia, ekonomi biaya tinggi. Faktor keamanan, ini masih menjadi isu. Struktur ekonomi Indonesia yang juga belum berubah, dan struktur industri yang juga mengalami penurunan dalam dua dekade terakhir, mengakibatkan industri di Indonesia kalah bersaing secara global.

Barusan saya dapat informasi dari Kementerian Tenaga Kerja, tahun ini ada 46.000 PHK baru. Infrastrukturnya juga masih terbatas, ekosistemnya belum kondusif. Kemiskinan, kalau kita menggunakan data 1,9 dolar per kapita per hari, memang angkanya kecil, tetapi kalau kita pakai standar yang lebih masuk akal, itu hampir 60% penduduk Indonesia masih dikatakan



miskin. Apalagi *human development index* kita baru di level 54% dari kapasitas penuh.

Nah, melihat tantangan-tantangan seperti ini, tentu Pak Menteri nanti juga di Pimpinan Nasional yang baru, ini menjadi satu tantangan yang harus dijawab. Sehingga mungkin cetak birunya perlu disiapkan, Pak, sehingga ke depannya benar-benar Indonesia menjadi surga investasi sekaligus kita menjadi tuan rumah di negara kita sendiri.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Terima kasih, Pak Harris.

Pak Harris ini kalau mendalami mantap, Pak, tapi sejak pakai safari terus itu lebih mantap lagi.

**F-P.NASDEM (H. P. MARTIN Y MANURUNG, S.E., M.A.):**

*Inget* ini, Pak Moerdiono.

**KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Pak Moerdiono.

**F-P.NASDEM (H. P. MARTIN Y MANURUNG, S.E., M.A.):**

Sama Pak Harmoko.

**KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Silakan sebelah kiri lagi, Pak Muslim.

**F-PD (MUSLIM, S.HI., M.M.):**

Terima kasih, Pimpinan.

*Assalam'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Pak Menteri beserta jajaran Kementerian Investasi,**



Pertama, tentu saya mengucapkan selamat dulu kepada Pak Rosan, yang satu bulan lagi menyelesaikan tugas di tahap periode sekarang. Mudah-mudahan mendapatkan posisi yang terbaik berikutnya, Pak Rosan.

Yang pertama, tentu kalau saya melihat rencana kerja dan anggaran Kementerian Investasi tahun 2025 ini, prihatin, Pak Menteri. Kenapa prihatin? Dari 1,2 triliun sekarang turun di 44,5%, yaitu 681 triliun. Artinya apa? Berarti ada satu target yang diharapkan pasti *enggak* akan tercapai, Pak Menteri, betul *enggak*? Artinya kita tahu betul investasi di tahun 2023, 1.200 triliun, tak tercapai. Kemudian, di 2024, 1.400 triliun, saya agak pesimis, Pak Menteri, mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Rosan nanti. Dari 1.400 triliun, saya melihat di sini baru mencapai 829,9 triliun. Artinya dengan target yang diharapkan, saya pesimis, ya. Namun demikian, ada keyakinan, Pak Menteri, keyakinan apa? Dengan sepak terjang Pak Rosan, dari mulai Ketua Umum Kadin, Dubes di Amerika, tentu ini punya harapan besar terhadap Pak Menteri, menyangkut target investasi yang kita harapkan.

Yang kedua, tentu investasi ini tidak lepas dari penyerapan tenaga kerja, Pak Menteri. Saya lihat di sini, di halaman 7 itu adalah penyerapan tenaga kerja sebesar 1,225 juta orang. Artinya apa? Seiring meningkatnya investasi, tentu peningkatan tenaga kerja juga akan meningkat.

Yang menjadi catatan buat saya adalah, Pak Menteri, tentu di poin 9. Di poin 9 ada kondisi yang dibutuhkan dalam pencapaian realisasi investasi 2025. Artinya ini ada pemerintahan baru. Nah, kalau kita mengacu dari sini, saya yakin kalau ini betul-betul dijalankan dengan baik, saya harapkan jangankan di posisi hari ini, pasti dua kali lipat akan tercapai, Pak Menteri. Kenapa saya katakan demikian? Dan menurut saya tidak terlalu sulit berkaitan investasi ini. Kita harapkan Pak Menteri mungkin lebih banyak di luar negeri nanti, Pak Menteri. Artinya apa? Seorang Menteri Investasi, saya yakin, harus paling banyak di luar negeri, Pak. Kenapa? Bagaimana beliau membangun komunikasi dengan jaringan-jaringan bisnis, sehingga target yang diharapkan bisa tercapai.

Yang kedua, kita lihat hari ini Vietnam, disampaikan Pak Harris tadi, ya. Vietnam ini luar biasa *nih*, Pak Menteri, bahkan sebentar lagi akan bangun pabrik, Vinfast, kalau *nggak* salah. Saya waktu itu sudah pernah ke Vietnam. Artinya bahwa ada satu *realita*, 8, hari ini Vietnam sudah berani investasi di Indonesia. Artinya apa? Bahwa harusnya kita harus lebih terus mendorong, bukan sebaliknya malah mereka yang keluar dari Indonesia. Tapi saya optimis, di tangan Pak Rosan ini, saya betul-betul yakin bahwa ini akan kembali investasi-investasi yang kemarin keluar dari Indonesia.

Yang berikutnya adalah sebaran investasi ini, Pak Menteri. Kita harapkan memang, kalau kita lihat di sini, antara Jawa dan nonJawa atau Sumatera ini antara 49,8 dan 50,2%. Tentu penyebaran investasi kita harapkan merata ini, Pak Menteri. Misal Aceh, kebetulan daerah saya ini, Pak Menteri, Sabang, dan lain-lain. Ini belum pernah dapat kucuran investasi ini.

Kita harapkan ke depan ini, ya mudah-mudahan, saya *nggak* tahu apakah Pak Rosan akan di sini atau dikasih tempat yang lain, saya *nggak* tahu, tapi saya berharap ini Pak Rosan bisa terus memberikan kontribusi. Artinya apa? Ketika wilayah di luar Pulau Jawa ini kita harapkan juga berkembang. Ini saya pikir selamat kepada Pak Plt. Sekjen Baru kita ini, ini menjadi catatan buat kita bahwa ketika ini kita dongkrak dari Sabang sampai Merauke, ini potensi besar sekali. Saya yakin Pak Rosan sudah punya gambaran terhadap langkah-langkah investasi ke depan.

Saya pikir itu, Pimpinan.

Terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

*Walaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh,*

Terima kasih, Pak Muslim.

Selanjutnya Pak Gde Sumarjaya Linggih,

**F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P.):**

Ya, Terima kasih.

**Pak Ketua, beserta  
Teman-teman DPR RI Komisi VI yang saya hormati,**

Sebenarnya saya minta terakhir, karena ingin agak santai, terakhir.

Memang ini menjadi catatan tersendiri dalam sebuah pengelolaan keuangan negara atau sebuah program atau proyek di mana anggaran menurun harus mencapai capaian yang lebih tinggi. Ini anomali kalau saya bilang *sih*. Walaupun Pak Harris tadi bicara, bahwa tidak linier katanya, ya. Tapi saya pikir ada liniernya juga, karena salah satu *tools* daripada untuk meningkatkan itu adalah biaya atau anggaran itu sendiri.

Banyak teman berkomentar tadi tentang kesiapan dari Pak Rosan untuk memimpin Kementerian Investasi ini. Karena pengalaman dan apa yang telah menjadi konektivitas dari Pak Rosan sendiri di internasional, ini menjadi sebuah kekuatan.

Kalau saya ibaratkan, mungkin mobilnya *udah* mobil balap ini, *gitu*. Tapi kalau bensinnya kurang juga ya, agak berat juga, *gitu*. Jadi, kalau tadi bilang linear, *nggak* linear juga, Pak. Kalau mobilnya kuat, harusnya bensinnya kencang, *gitu*, sehingga akhirnya capaiannya juga sangat tinggi.



Begitu juga tentang bagaimana pertumbuhan kita. Kita tahu rumus-rumus pertumbuhan kita, kemudian bagaimana kita mensejahterakan masyarakat melalui pertumbuhan, bagaimana kita penyerapan kerja juga melalui adanya investasi. Tentu hampir semua sudah paham di sini tentang hal tersebut.

Untuk itu, tidak bisa juga kita harus mendikte untuk mencapai target ini, karena memang sangat aneh kalau turunnya, mungkin biasanya turun 20%, akibat ada suatu proyek khusus. Kayak kemarin, waktu Covid, sempat ada pemotongan, karena memang kondisi sedang tidak baik-baik saja. Kalau sekarang ini kondisinya sedang baik-baik saja, *gitu*.

Dan saya dengar juga persoalan susu dan makan sehat itu akan dimasukkan dalam anggaran pendidikan. Jadi, kalau di anggaran pendidikan, berarti kan masuk BAK-nya yang 20% itu. Jadi, *nggak* ada masalah saya lihat kalau ke situ masuknya, *gitu*. Sehingga saya pikir anggaran-anggaran yang lain akan menjadi normal saja, *gitu*. Tapi rupanya saya menemukan di sini normal. Mudah-mudahan nanti, karena kebetulan saya bukan Banggar, jadi teman-teman Banggar nanti lebih memperjuangkan. Masih ada waktu sedikit lagi ini, sampai sekarang ini masuk ke Banggar, setelah Banggar, nanti kita ketok lagi di Komisi. Barangkali ini menjadi perhatian dan *aware* bagi teman-teman di Komisi VI untuk bisa, ya paling tidak, pemotongannya 10%, *gitu*, masih mungkin untuk bisa mengerjakan target yang meningkat.

Itu barangkali, Pimpinan. Dan saya ucapkan selamat kepada Pak Rosan atas menjadi Menteri Investasi pada saat ini. Dan mudah-mudahan kerja sama baik antara Kementerian Investasi dan Komisi VI yang selama ini di, apa, dirintis oleh Pak Bahlil, terus berlanjut di Pak Rosan.

Itu saja, Pimpinan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Terima kasih, Pak Demer.

Selanjutnya Prof Darmadi.

**F-PDIP (Prof (Assc) Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):**

Terima kasih, Pimpinan.

**Pak Sekjen, Selamat Pak Sekjen, ya, saya selamat dulu, Pimpinan saya, Pak Sekjen, Yang kedua, selamat buat Pak Rosan, kariernya naik terus, kita ikuti, karena berhasil, kalau *enggak* berhasil, *enggak* mungkin naik, *gitu*, Pak**



**Rosan ini, kalau menurut kami, Korea juga, gitu, Korea-Korea juga ini, Dan juga dari Kementerian Investasi, terima kasih atas kehadirannya,**

Yang pertama, memang menarik ini, Pak, soal anggaran. Bapak dituntut naik, tapi anggarannya turun. Tapi *kan* pasti ada sebab, Pak, *nggak* mungkin *nggak* ada sebab. Banyak versi, saya *ngomong* dengan orang Bappenas itu cukup lama, Pak, karena kami undang-undang RPJP. Kalau menurut orang Bappenas, mereka evaluasi pakai GRC, Pak. Pak Menteri *kan* tahu GRC. Jadi, kalau dianalisis pakai GRC, maka buruk ini Kementerian Investasi. Karena buruk, maka banyak program dibuang, anggarannya *turunin*. Betul *kan*, Pak Yuliot? Selamat juga *nih*, Pak. Teman lama saya juga *nih*, Pak, ya.

Kalau G itu *government*, Pak, berarti *governance*, tata kelolanya *nggak* bagus. R itu *risk*, manajemen risikonya *nggak* benar. Dan C-nya itu *compliant*, kepatuhan dalam peraturan itu *nggak* bagus, makanya disingkat GRC. Nah, saya pikir tugas Pak Rosan, evaluasi 3 ini, ada apa di Kementerian Investasi? *Kan* ini Pak Rosan belum *kan*? Kemarin masih di Wamen BUMN pun juga sebentar, *enggak* lama.

Tapi pihak lain melihat ada masalah di sini. *Kan enggak* mungkin, Pak Rosan, kalau lagi naik-naik di perusahaan, omset naik, diturunkan anggarannya, sebetulnya. Karena ada masalah di sini, maka banyak program dicoret, wah, ini anggarannya *enggak* perlu sebesar itu. Diturunkan hampir *separoh* dari yang diminta, betul *kan*, Pak Menteri? Nah, ini menjadi introspeksi, Pak, sebetulnya, *kok* dipotret, GRC-nya *kok* buruk. Sementara yang lain juga dikurangi tapi tidak sebesar itu. Nah, ini yang mohon nanti dianalisis, apakah betul? Kalau *nggak* benar, disanggah, Pak.

Pak Menteri, benar *nggak* kira-kira kalau ini ada masalah, ada penyebab kenapa anggarannya turun? Kalau saya Menteri, kalau saya Menteri Bappenas atau Keuangan, kalau ini bagus semuanya, pasti saya naikan, Pak, anggarannya. Orang dituntut berapa? 1.850 triliun. Diturunkan tinggal 600-an miliar. Pak, kalau saya lihat dibanding dengan tahun lalu, Pak, anggaran ini, Pak, wah babak belur, Pak.

Ada operasional yang tadinya 190 M jadi nol, Pak, non-operasional itu. Ini akibatnya apa jadi nol ini, Pak? Deputi Hilirisasi yang programnya, Pak, Pak Jokowi yang disebut-sebut Pak Prabowo tinggal 7,5 M, Pak. Mau kerja apa ini, Pak? Ini tugas berat, Pak Rosan. Tapi saya percaya, karena Pak Rosan ini Korea, kalau menurut Pimpinan kami. Korea itu bisa keluar dari semua masalah, cepat. Jadi saya optimis *nih*, dengan 650 M, Bapak bisa mencapai 1.850 triliun, Pak, *gitu*. Saya optimis juga, Pak, *gitu*. Betul *kan*, Pak Menteri? *Gak* usah ditambah ini, ya. Kalau bisa dapat tambahan, ya bagus, syukur *alhamdulillah*.

Jadi, nanti, Pak, analisis dan Pak jawab mengenai GRC ini, *gitu*. Ada masalah apa *sih* sebetulnya ini? Nah, itu bisa juga. *Governance*, tata kelola. Ada *nggak* di Kementerian Industri *government*-nya jelek? *Risk*, risikonya.





*Compliance*-nya, kepatuhannya, *enggak* terhadap peraturan, *enggak* ada, *nabrak* sana-sini, *gitu*. Nah, kalau ini ada ya, buruk juga. *Kan* Bappenas menggunakan GRC untuk evaluasi, Pak. Nah, ini mohon catatan dari Kementerian Industri.

Yang kedua adalah, Pak, sebetulnya tugas berat juga, Pak, investasi. Karena *kan* kita sedang *enggak* baik-baik saja, sebetulnya, Pak. Daya beli turun, PMI *kan* turun, Pak Menteri. Orang mau masuk ke sini, ya, dihadapkan sekarang PMI di sini turun, Pak. Barang impor murah-murah banyak masuk ke sini, industri banyak yang buruk. Betul *kan*, Pak Rosan? Keramik *ngeluh* ke sini, Pak. Banyak *ngeluh* ke sini, Pak. Keramik, tekstil, datang ke sini.

Nah, ini problem semua, Pak, sehingga banyak yang harus dihadapi. Belum lagi gas alam, Pak. Pak Rosan tahu di KADIN, Pak? Gas alam itu sekarang kuotanya diturunkan tinggal 50%, Pak. Dari Kepmennya itu yang dialokasi itu tinggal 50%. *Kan* harganya berapa, Pak Rosan? 6 US? Sekarang kalau pakai di atas 50%, Pak, barangnya ada, Pak, tapi naiknya 13 dolar lebih per MBTU. Yang lain banyak, Pak.

Nah, ini harus diselesaikan, Pak, lintas kementerian, Pak. Apa yang harus dilakukan supaya orang investasi di sini, jangan dihadapkan dengan banyak problem. Gas *aja* masalah, Pak. Mau investasi di sini, gas *aja* masalah. Infrastruktur masalah, izin masalah, lahan masalah, semua masalah, Pak. Mau *invest* sudah besar, mau biayai *cash flow*, *nggak* bisa *import* barang sementara untuk *nutupin* investasi di sini, investasi triliunan.

Peraturan berubah-ubah, Pak. Permen itu berubah-ubah, Pak. Betul, Pak? Bingung, *kan*? Investor, Pak Rosan. Nah, ini masalah. Nah, ini *nggak* berat. Nah, ini tugas Pak Rosan untuk apa strateginya untuk lintas kementerian. Nah, coba evaluasi itu, Pak Rosan. Satgas Investasi itu jalan *nggak*, *tuh*, Pak? Jalan *nggak*, *tuh*, Pak Sekjen? Untuk memberantas banyak sekali pungli-pungli. Pungli banyak *nggak*, Pak? Pungli *kan* banyak, *kan*, Pak? Maka *I-Core*-nya buruk, *kan*? Tinggi. Kalah sama Laos, Kamboja, *kan*? Sama Vietnam, kalah semua. *I-Core*-nya kita *kan* buruk. Berarti *kan* banyak pungli, kata Pak Bahlil kemarin. Nah, ini tugas Pak Menteri ke depan. Nah, ini harus dibahas.

Yang ketiga adalah nanti datanya disinkronkan, Pak Menteri, dengan jumlah tenaga kerja yang berhasil diserap. Ini naik, tenaga kerjanya naiknya signifikan, *nggak*? Korelasinya bagaimana? Apakah dia korelasinya bagus, regresinya bagus, atau tidak, *gitu*. Jangan-jangan investasinya tidak menarik investasi, tidak menambah tenaga kerja secara signifikan. Nah, ini tolong dibandingkan nanti datanya di sini, *gitu*. Ini *kan* sekarang 1,2 juta lebih. Ini yang nanti coba Pak Menteri lihat kembali begitu. Saya tahu Bapak *kan* baru ini. Dan saya dengar-dengar Bapak juga lanjut nanti, *kan*. Jadi itu, saya doakan, Pak. Mudah-mudahan doanya sesuai. *Nggak* tahu Bapak mau di bidang lain atau *enggak*, *gitu kan*. Tapi saya tahu Bapak ini orang hebat, pintar. Kalau *nggak* pintar, *nggak* mungkin berhasil terus ini, Pak.

Ada angin baru di Kementerian Investasi. Dan saya mau warnanya agak beda, Pak. Jadi, bukan sekadar, apa program Pak Rosan? Lanjutkan. Lanjutkan apa? Harus ada *differentiation*. Diferensiasi, Pak, Pak Rosan. Dan saya tahu Pak Rosan mampu, *gitu*.

Jadi, Bapak mitra kami yang baru, kami *welcome*, Pak. Kita bekerja sama, Pak, dengan Komisi VI. Jadi Menteri, kita *partner*, Pak, kami ini bukan anak buah, Pak, kami ini bukan orang asing. Kami ini, kita sama-sama bekerja sama membangun negara ini. Jadi, kalau kami ada apa-apa, laporan Bapak, Bapak jangan *nggak* jawab WA kami, Pak. Bapak, saya minta janji dulu *nih*, kalau kami WA, *nyampaikan* aspirasi, Bapak jangan *nggak* jawab. Karena banyak menteri, belum jadi menteri *sih* jawab, Pak, setelah jadi menteri, wah, lupa, Pak. *Nggak* jawab-jawab lagi, Pak, *gitu*.

Kalau Pak Yuliot *sih*, saya ucapkan selamat, langsung jawab dia. Jadi itu, mau pun telat dua, tiga jam, ya. Tapi jawab, Pak, ini semua deputinya bagus, Pak, jawab semua, Pak. Saya kasih tahu Bapak, ini responsif semua. Kalau ditanya, semua jawab. Bagus, Pak. Tapi Pak Menteri juga begitu, saya minta. Karena aspirasi banyak, Pak, terutama Dapil saya, Pak. Pak Menteri tahu Dapil saya? Jakarta Barat, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu, ini tempatnya investor, Pak. Tinggalnya di PIK, Pluit. *Loh*, harus dicatat, investor *kan* tinggal di situ, Pak. Betul, Pak, lebih besar dari Bali, investasinya. Sembilan naga di tempat saya *loh*, Pak. Jadi, saya minta kerja sama, mohon bantuannya.

Tentu yang terakhir adalah kami perlu juga program-program sosialisasi ke investor ini, Pak. Ini kami lakukan dengan benar, transparan. Betul, *gak*? Saya *kan* lakukan dengan benar, Pak. Bapak tahu *kan*, saya undang. Nah, saya mohon yang datang jangan kepala apa? Ya, Deputi *lah*, minimal, Pak, yang kirim ke kami. Setuju *nggak* ini? Yang dikirim ke kami itu deputi, Pak. Apalagi hanya Jakarta, Pak Menteri, masa yang dikirim ke saya bukan Deputi, orang di Jakarta *kok*. Jadi mohon itu, sehingga nanti lebih gagah ke investor. Ini yang datang siapa? Deputi, wah datang, Pak. Ini yang datang siapa? Staff, Pak, ya. Robi yang *dateng*, mati Pak. Jadi, saya minta itu.

Terima kasih, Pimpinan. Waktunya sedikit, saya hanya tiga menit tadi.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Itu kalau sosialisasi yang diundang sembilan naga, Pak Menteri datang. Jelas investasinya.

Terima kasih, Pak Prof Darmadi.



Selanjutnya Bang, Pak Herman Khaeron. Calon menteri juga ini. *Sorry, sorry, sorry*, mestinya ke kanan dulu, *sorry, sorry*.

**F-PD (Dr. Ir. H. E. HERMAN KHAERON, M.Si.):**

Ini sudah saya putus ini.

**KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Pak Rudi, Pak Rudi.

**F-P.NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.A.P.):**

Terima kasih, Ketua.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat sore,  
Salam sejahtera bagi kita semua,

**Yang saya hormati Pimpinan, dan  
Seluruh Anggota,  
Yang saya hormati Pak Menteri,  
Pak Wamen,  
Deputi dan jajaran,**

**Pak Menteri, Pak Rosan,**

Jadi kalau saya ini yang ringan-ringan saja, Pak. Karena rapat kita hari ini rapat kerja dengan Menteri Investasi membahas empat agenda, Pak. Ini ada Bapak sampaikan agenda RKA, Realisasi 2024, *Prognosa*, dan Sistem OSS.

Jadi yang pertama, Pak Menteri, Pak Rosan, ini saya ingin bertanya juga, yang Bapak sampaikan dan Pak Deputinya, *gitu*. Ini *kan* Bapak di sini *nyampaikan* tentang anggaran di 2025. Ada Bapak sampaikan di Anggaran Deputi Promosi dan Penanaman Modal ini 295 miliar. Artinya deputi ini adalah yang paling besar menyerap anggaran di kementerian Bapak. Dan yang saya lihat, pasti deputi ini menjadi tulang punggungnya, andalan di Kementerian Investasi, *gitu*, Pak.

Nah, yang saya ingin tanya, Pak Rosan, kira-kira, dengan anggaran hampir 300 miliar ini, RKA-nya ini, di Deputi ini, Penanaman Modal, program yang akan dibuat oleh Deputi Bapak ini untuk menarik investasi ke Indonesia, ini seperti apa, Pak? Pak Rosan. Karena ini *kan* dari empat agenda ini, saya belum melihat, *gitu*.

Jikalau, Pak Rosan, jikalau deputi ini tugasnya berpromosi, misalnya, ini apakah sudah ada kantor-kantor di luar negeri? Cabang-cabang



Kementerian Investasi ini di luar? Kalau ada, di mana saja, Pak? *Gitu*. Dan tentunya *kan* harus punya juga parameter ukuran, Pak. Jika membuat kantor di luar, negara mana yang paling banyak berinvestasi? *Gitu kan*, Pak Rosan pasti paham. Misalnya yang terbesar Singapura, kemudian ada China, dan yang lain-lain, *gitu*. Kalau yang lain, yang mana, *gitu*. Kami, saya mohon penjelasan Pak Menteri, Pak Rosan.

Dan tadi juga, Pak, yang tentang RKA ini, sudah Bapak sampaikan juga, ada kesamaan dengan anggaran Deputi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Artinya Pak Rosan ini, saya belum, saya *nggak* tahu apakah Bapak sudah paham atau belum, anggaran Pengendalian Penanaman Modal dan Anggaran Promosi Penanaman Modal ini yang 167 miliar ini yang Bapak sampaikan, apakah ada bedanya, Pak, *gitu*? Sistem-sistem kerja-kerjanya seperti apa, *gitu*, Pak, antara deputi ini? Karena kita *kan* membahas, di sini RKA, *sih*, saya lihat, Pak, dan juga realisasi anggaran tahun 2024 ini di semester 1. Jadi, mohon Pak Rosan bisa menjelaskan yang saya tanyakan dan ketidakpahaman saya, Pak Rosan.

Yang ketiga, yang terakhir, Pak, ini *kan* jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi beberapa negara, misalnya di China yang saat ini di angka 5 koma sekian persen, di Eropa juga, di Amerika, dan negara lain. Semuanya rata-rata di satu digit, Pak, pak Rosan, perusahaan pertumbuhan ekonominya, *gitu*. Jadi, dengan kondisi seperti ini, *gitu*, tadi sudah disampaikan sekilas, ini *kan* ada angka target investasi di, di tahun ini 1.200 triliun, sebelum Pak Rosan masuk itu, saya dengar dari Pak Bahlil. Dengan data yang ada sekarang ini, pertumbuhan ekonomi negara-negara maju yang 5 koma sekian persen, apakah masih yakin kita ini masih bisa menarik investasi ini sampai 1.200 triliun, Pak? *Gitu*. Ini yang realisasi tahun 2024.

Dan juga yang ingin saya ingatkan, Pak Menteri juga, Pak Rosan, apakah bisa di 2025 akan lebih besar target menarik investasi ke Indonesia, *gitu* oleh Pak Menteri, *gitu*? Nah, itu, Pak, yang ingin saya ingatkan di agenda empat hari ini.

Yang terakhir ada OSS, mungkin ada teman-teman yang lain nanti yang menanyakan *gitu*, Pak. Terima kasih. Pimpinan, saya kembalikan.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

*Walaikumussalam,*

Terima kasih, Pak Rudi.

Selanjutnya, Pak Herman Khaeron.

**F-PD (Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):**



Terima kasih.

**Pimpinan, dan  
Seluruh Anggota Komisi VI yang saya hormati,  
Pak Rosan, Menteri Investasi Kepala BKPM dengan Wakil, dan  
Para Eselon I yang saya hormati, saya banggakan,**

Pertama, selamat Pak Rosan menjadi menteri kembali. Dan di pundak Bapak, harapan besar investasi ke depan semakin baik, semakin berkualitas. Dan sebagai instrumen pertumbuhan, investasi menurut saya harus *firm* dan tentu jangan mengingkari terhadap data sebenarnya. Ini penting. Oleh karenanya, kalau ke depan ada revisi mungkin terhadap target-target, menurut saya secara kerasionalitasan, dengan berbagai persoalan, lebih baik sejak sekarang. Daripada nanti kita sudah *mentargetkan* terlalu tinggi tetapi capaiannya rendah. Ini yang menurut saya harus dirancang sejak sekarang.

Karena kalau angka-angkanya terlalu tinggi, realisasinya tidak sesuai, maka target untuk meningkatkan kesejahteraan, target untuk meningkatkan pertumbuhan, untuk membuka lapangan pekerjaan, ini tidak akan tercapai. Nah, ini akan mengganggu kepada instrumen pertumbuhan lainnya, misalkan terhadap daya beli. Bahkan hari ini ada kecenderungan deflasi. Ini juga menunjukkan terjadinya instabilitas perekonomian nasional kita. Oleh karenanya, dengan kemampuan, saya tidak ingin menggurui Pak Rosan. Dengan pengalaman Pak Rosan, saya yakin bahwa investasi ke depan lebih baik. Itu dulu harapan dari kami.

Yang kedua, kalau melihat dari anggaran untuk meningkatkan kinerja kementerian, ini yang menjadi tidak rasional lagi. Karena alokasi anggaran yang dialokasikan hanya 40% kurang lebih dari anggaran sebelumnya, tentu semakin kontraproduktif dengan target. Target capaian dari renstra pada tahun ini adalah 1.239,3 triliun. Dan ada target yang ini menjadi target presiden, yaitu 1.650 triliun, karena capaian sebelumnya dari target renstra 900, kemudian hasil pelaporan 2023 bisa mencapai, mohon maaf, 2022, bisa mencapai 1.200 triliun. Dari target 1.100 triliun di tahun 2023, dicapai 1.400 triliun.

Nah, saya khawatir sebetulnya, kalau investasi dalam lima tahun ini ada dalam satu keranjang, *gitu*, dalam satu karung. Nah, kalau diambil terlalu banyak di awal, ini bagaimana *nih* realisasi di akhir ini? *Gitu*. Pak Rosan ini *kan* hanya tersisa empat bulan *lah*, tiga bulan, eh, dua bulan. Hanya tersisa dua bulan. Hanya tersisa dua bulan. Kalau melanjutkan terhadap akhir tahun, berarti masih tersisa empat bulan. Nah, artinya, apakah secara kerasionalitasan ini bisa tercapai dengan target, baik target renstra yang 1.239,3 triliun maupun target yang disampaikan presiden, 1.650 triliun. *Existing* bahwa hari ini tercapai *year-on-year*-nya 829,9 triliun. Memang naik dari tahun sebelumnya, tapi nanti seperti apa akhirnya. Jadi, saya ingin, ingin juga, Pak Rosan, dengan kalkulasi yang lebih matang bagaimana untuk bisa mencapai terhadap dua target tadi. Itu pertanyaan saya, Pak.



Yang ketiga, selain tentu tadi untuk bagaimana merasionalitaskan antara target yang tahun ini harus dicapai dengan tahun depan yang harus dicapai, karena anggarannya menurun. Kemudian, bagaimana juga dengan target-target pembangunan yang semakin meningkat di era nanti Presiden Prabowo. Artinya, selain kita punya beban harus membayar hutang, mungkin, ya mungkin, mungkin naik, kemudian ada target-target pembangunan yang lebih besar kebutuhannya. Ini bagaimana, Investasi men-*trigger* untuk sampai kepada pertumbuhan mungkin di 7-8%. Cara dan strategi apa? Sedangkan pada sisi lain, anggaran tahun 2025 hanya 40% dari 1,571 triliun menjadi 681,880 triliun. Oleh karenanya, kami dari fraksi Partai Demokrat, mendukung untuk mengusulkan tambahan, bukan hanya ke angka 889 triliun sebetulnya.

Kalau memang ada target-target besar yang ingin dicapai, karena ini adalah ruh pertumbuhan ekonomi nasional, maka direvitalisasi kembali, dirasionalisasi kembali target-target tersebut terhadap anggaran yang harus dicapai pada tahun 2025. Menurut saya tidak ada persoalan. Ini adalah momentum, Pak Rosan, momentum. Artinya, kalau ingin targetnya 1.650 triliun, maka ya anggaran pemerintahnya berikut untuk promosi, untuk meningkatkan agresivitas investasi, untuk meningkatkan rencana pembangunan ataupun *planning* area di dalam negeri. Ini *kan* butuh biaya, *gitu*. Nah, kalau butuh biaya, tentu ini tidak akan cukup, *gitu*.

Nah, untuk bisa mencapai itu, ya *segini*. Saya kira kami yakin Pak Prabowo ke depan juga akan lebih rasional untuk mengukur, akan lebih punya ukuran-ukuran yang lebih pasti di dalam mencapai target-target investasi. Sehingga betul-betul, sekali lagi, mendukung terhadap pertumbuhan ekonomi, mendukung terhadap terbukanya lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Yang terakhir, kami juga berharap investasi ke depan di pundaknya Pak Rosan, ini menjadi lebih inklusif dan berkualitas. Maksud saya berkualitas itu adalah investasi betul-betul bisa meningkatkan satuan kesejahteraan dalam rumusan-rumusan yang lebih, yang lebih *afdol*, yang lebih, yang lebih berpihak kepada kesejahteraan rakyat.

Percuma saja kalau investasi banyak, tetapi tenaga kerjanya asing, misalkan. Percuma saja investasi banyak, kalau kemudian tidak memberikan dampak, efek terhadap pendapatan masyarakat. Ini yang korelasi antara peningkatan investasi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, dan pada akhirnya terhadap daya beli. Menurut saya ini penting diuraikan, sehingga betul-betul ke depan, peningkatan kuantitas ataupun peningkatan nilai investasi yang ditargetkan juga sejalan dengan peningkatan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat.

Yang kedua, berkualitas secara lingkungan, Pak. Contoh di daerah pemilihan saya di Cirebon, ada wilayah yang saya juga sedih melihatnya. Kalau saya kunjungan kerja ke sana, itu selalu kami akan melihat bagaimana



tanaman palawija, pohon jagung, tebu, kemudian. Itu adalah area-area produktif. Area-area produktif untuk sektor pertanian.

Nah, sekarang sudah tumbuh pohon-pohon beton dan pabrik-pabrik di situ, Cirebon Timur, Pak. Mungkin Pak Sekjen pernah ikut dengan saya ke sana. Pak Sekjen atau siapa yang pernah ikut ke, *kan* kalau Sekjen *kan* hilirisasi, ya. Oh, ke Babel kemarin.

Nah, Kalau kondisi investasinya seperti ini, mengganggu terhadap pertumbuhan sektor lainnya, mengganggu terhadap pertumbuhan sektor pangan, mengurangi tingkat produktivitas sektor pangan, *kan* tidak ada bedanya meningkatkan pada sisi satu, tapi mengurangi sisi lainnya. Akhirnya tidak berkualitas, baik kualitas investasi yang itu bisa meningkatkan berbagai sektor, maupun terhadap kualitas lingkungannya. Karena setelah dibangun pabrik-pabrik, banjirnya semakin besar di sana. Semakin lama untuk terjadinya surut, karena memang itu adalah *catchment area*. Itu adalah wilayah serapan yang sesungguhnya dulu sumber air untuk sektor pertanian. Ini sayang.

Jadi, ke depan mungkin, Pak Rosan, campur tangan Bapak ini sebagai Menteri Investasi dan BKPM sampai kepada komitmen lingkungan tadi. Selain tentu berkomitmen secara global terhadap komitmen perubahan iklim, juga ya komitmen terhadap lingkungan yang lebih mikro. Wilayah-wilayah yang mana yang sesungguhnya ini tepat untuk dijadikan sebagai kawasan industri, pengembangan investasi, mana yang kawasan itu harus dipertahankan sebagai lumbung pangan, sebagai pembangunan sektor-sektor lainnya. Menurut saya ini harus sampai kepada situ, bukan hanya kemudian secara kuantitas investasinya semakin besar, tapi kerusakan lingkungannya semakin besar, jadi *nggak, nggak balance*.

Dalam jangka pendek, betul, ini bisa meningkatkan pendapatan, tetapi dalam jangka panjang ini akan menyerap biaya investasi yang besar terhadap APBN. Karena bagaimanapun kalau terjadi kerusakan lingkungan, yang bertanggung jawab akhirnya negara, *gitu*.

Nah, menurut saya ini dihitung saja. Saya lebih rasional untuk bisa menerima apa pun yang disampaikan oleh pemerintah sepanjang ini betul-betul dihitung secara tepat, secara rasional. Kalau memang, aduh target ke depan, Pak, dengan situasi internasional, kemudian ketersediaan kawasan, dan lain sebagainya, termasuk mungkin kemampuan tenaga kerja, maka investasi mungkin maksimal 1.000 triliun. *Gak* apa-apa, yang penting kualitasnya tinggi, kualitasnya bagus, dan rasional, *gitu*. Betul-betul target-targetnya secara rasional terukur memang itu adanya, *gitu*.

Saya kira itu, Pak Rosan. Dan mudah-mudahan ke depan, saya kira akan lebih baik dan investasi akan lebih berkualitas. Tentu pada akhirnya bisa menjadi penopang terhadap pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.



Terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

*Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,*

Selanjutnya, ini sebelah kiri semua *nih*.

Ibu Melani.

**F-PD (Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI):**

Terima kasih, Pimpinan.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Yang saya hormati Pimpinan, dan  
Teman-teman Anggota Komisi VI,  
Yang saya hormati Pak Menteri,  
Pak Wamen, dan jajarannya dari Kementerian Investasi,**

Tentunya seperti teman-teman yang lain, saya juga mengucapkan selamat atas Pak Rosan telah terpilih menjadi Menteri Investasi dan Ketua BKPM yang baru, juga selamat kepada jajaran Pak Rosan yang baru menjabat juga.

Banyak sekali yang sudah ditanyakan oleh teman-teman saya, saya cuma ingin menanyakan apakah Kementerian Investasi/BKPM bisa menjelaskan data yang jelas tentang berkait investasi dan investor di IKN? Karena saya lihat IKN *kan* lagi dibangun, pasti banyak yang harus di-*invest* di situ. Apakah ini juga sudah menggaet investor-investor asing? Dan dari mana saja? Ini juga bisa membuka pastinya lapangan kerja.

Dan saya mau menanyakan juga bagaimana tentang hilirisasi. Dan waktu itu Pak Rosan mengatakan juga untuk pertambangan dan sebagainya, membutuhkan juga lapangan pekerjaan. Dan untuk mengembangkan juga di sektor *tourism* pariwisata, tentunya membuka investor dan menambah lapangan pekerjaan.

Kemudian, kalau *nggak* salah juga di acara KADIN, Pak Rosan juga mengatakan bahwa akan diadakannya 3 juta rumah, ya? Rumah itu juga menyerap investor-investor untuk diadakannya perumahan-perumahan untuk rakyat. Ini ada hubungannya dengan nantinya penanaman modal, investasi, atau bagaimana, untuk perkembangannya?



Dan seperti juga teman-teman saya yang lain, kita juga, apa namanya, merasa kenapa dikurangi anggarannya, mudah-mudahan ini bisa terselesaikan. Tadi teman saya, Pak Dar, mengatakan, Prof mengatakan bahwa apakah harus ada Satgas Investasi, apa yang dilibatkan, kenapa sampai dikurangi? Padahal kalau investasi dari BKPM itu bagus, kenapa dananya harus dikurangi?

Kemudian, seperti melihat bahwa penanaman modal BKPM juga memfasilitasi pelaku usaha mikro dan kecil dan untuk mengurus izin usahanya. Fasilitas tersebut itu bagus sekali pada waktu diadakan acara sosialisasi untuk Nomor Induk Berusaha (NIB), di mana Kementerian Investasi mendorong pelaku UMKM untuk mengurus legalisasi usaha. Itu menjadi kunci utama bagi para pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha.

Dan saya mau menanyakan, apakah sebenarnya yang menjadi kendala dalam realisasi selama ini? Karena NIB itu bagi pelaku UMKM sangat berguna sekali, dan implementasinya di lapangan hingga akhir 2024 bagaimana? Dan rencananya untuk 2025 seperti apa? Karena UMKM yang berbadan usaha masih sangat didominasi lebih dari 90% atau 64,19 juta UMKM. Karena itu, Kementerian Investasi kita harapkan menargetkan UMKM yang mendapatkan NIB dan targetnya tentunya di tahun 2025 seperti apa?

Mungkin itu saja, Pimpinan.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

*Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,*

Terima kasih, Bu Melani.

Dengan demikian, semua sudah menyampaikan pendalamannya. Oh, Pak Haikal? Silakan.

**F-P.GERINDRA (MOHAMAD HEKAL, M.B.A.):**

Terima kasih, Pak Ketua.

**Pak Menteri,  
Pak Wakil Menteri, dan jajarannya yang kami hormati,**

Kalau saya cuma mau *ngucapin* selamat untuk Pak Rosan, karena beliau ini *udah* ada kisi-kisinya, kan. Kalau dikasih masuk di dua bulan terakhir, itu mudah-mudahan panjang ke depannya, *gitu kan*.



Nah, kita tentunya, tadi saya dengar sangat tinggi sekali target investasinya. Tapi itu memang juga yang kita harapkan dari Menteri sekelas Pak Rosan untuk membantu pertumbuhan ekonomi yang diharapkan oleh Pak Presiden dan tentunya kita semua sebagai bangsa, karena kita perlu pembukaan lapangan pekerjaan yang cukup luas dan bisa menyelesaikan *lah* masalah *middle income trap* Republik Indonesia.

Sebagaimana kita *ketahui kan*, kita punya *manufacturing index* juga semakin turun. Nah, kita berharap, selain daripada sekedar mengejar investasi, investasi ini *kan* harus terarah, pangan, hilirisasi, dan *transfer of technology*. Dan memang yang paling penting, supaya kita bisa meningkatkan TKDN, target yang kita harapkan, supaya perputaran uang ini bisa kita jaga di dalam negeri. Nah, mudah-mudahan, Pak Rosan, kami yakin akan kemampuannya, bisa langgeng sebagai Menteri, duduk di seberang kita ini, ketemu lagi setelah Oktober.

Terima kasih, Pak Ketua.

**F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):**

Pimpinan.

**KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Siapa?

Oh, Pak Hakim. Tadi saya cari-cari, Pak.

**F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):**

Ke toilet, Pimpinan.

**KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Lama juga ke toiletnya.

Silakan, Pak Hakim.

**F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):**

Terima kasih, Pimpinan.

**Pak Sekjen yang mulia,**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh,*

**Yang saya hormati Pimpinan, dan**



**Anggota Komisi VI,  
Yang mulia Pak Saramuji, Pak Saramuji, Pak Sekjen, Pak Sekjen,  
Yang saya hormati Pak Rosan, Menteri Investasi Kepala BKPM, dan juga  
seluruh jajaran,**

Pertama-tama, sama seperti teman-teman, Pak Rosan, mengucapkan selamat atas amanah barunya. Mudah-mudahan amanah baru, jabatan baru ini bisa meningkatkan kinerja Kementerian Investasi.

Kemudian, selanjutnya berkaitan dengan pembahasan anggaran. Namun sebelum itu, Pak Rosan, mungkin saya ingin menyampaikan kepada teman-teman Deputi. Ini menteri baru, mungkin nanti kalau berkaitan dengan materi itu, *feeding* materinya jangan sampai ada salah data seperti yang disampaikan oleh Prof. Harris tadi. Karena deputi ini kan *support system*-nya daripada menteri, kan. Jadi, jangan sampai memberikan data-data atau mungkin informasi yang kurang tepat.

Kemudian, Pak Rosan, berkaitan dengan anggaran. Jadi, *jenengan* ini kan memang *background*-nya sebagai pengusaha. Tentu, kalau pengusaha ini, apa yang dikeluarkan itu harus selaras dengan apa yang didapatkan. Pada prinsipnya, penambahan-penambahan anggaran ataupun usulan tambahan ini, tentu kami dari Komisi VI itu *monggo, enggak* apa-apa, Pak, selama memang sesuai dengan target yang diharapkan.

Mungkin nanti ke depannya, Pak, berkaitan dengan target-target investasi itu bisa juga dipaparkan juga. Selain capaian realisasi investasi, kira-kira dampak lain seperti bisa menyerap berapa tenaga kerja, serapan tenaga kerja sudah muncul dan kemudian juga bisa disambungkan dengan menekan angka kemiskinan atau pengangguran, seberapa besar? Jadi, kalau selama ini *kan* yang disampaikan serapan atau realisasinya seberapa besar, dan kemudian bisa menyerap tenaga kerja seberapa banyak?

Nah, kalau ini kemudian dibandingkan dengan menekan angka kemiskinan, kira-kira sejauh apa? Karena kalau melihat dari data, kalau saya melihatnya data BPS, Pak Rosan, ya. 2022, angka kemiskinan 26,36 juta, kemudian di 2023 25,9, turun 0,46, dan kemudian di 2024 per Maret, itu 25,22 juta, turun 0,68 juta.

Padahal di sini ada paparan yang menjelaskan serapan tenaga kerjanya cukup banyak. Penyerapan tenaga kerja 1,2 juta. Akan tetapi jika dilihat dengan, apa, pengurangan angka kemiskinan, itu masih belum bisa selaras. Dan memang tadi disampaikan sama teman-teman, untuk mengukur angka kemiskinan ini kan ada pendekatan-pendekatan yang berbeda. Nah, itu nanti mungkin kami ingin itu dapat peranan komprehensif berkaitan dengan target daripada realisasi investasi.

Kemudian, selanjutnya, ini saya *nyuwun tulung*, Pak Rosan, karena ini juga termasuk domainnya daripada Kementerian Investasi. Kalau saya melihat di sini *kan* ada Deputi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.



Tentu ini tugasnya *ngecek* investasi-investasi yang sudah berjalan di Indonesia, baik asing ataupun pemodal dalam negeri, itu sejauh apa?

Minggu lalu ada demo ojek *online*, Pak. Walaupun berkaitan dengan peraturan teknisnya ini lintas kementerian. Akan tetapi, Pak, saya *nitip*, Pak, mudah-mudahan ini bisa dibahas pada rapat kabinet. Karena memang ojol ini menjadi salah satu solusi untuk, dalam tanda kutip, mengurangi pengangguran. Akan tetapi yang terjadi kemarin ada indikasi bahwasanya potongan tarif itu tidak sesuai dengan yang telah, potongan tarif itu tidak sesuai dengan yang telah disepakati, Pak. Ada indikasi di situ, walaupun ini peraturan teknis yang mungkin ada dari Kementerian Kominfo, ada dari Kementerian Perhubungan, *panjenengan* di sini sebagai *leading sector*-nya berkaitan dengan urusan investasi. Saya *nitip*, Pak, ini hajat hidup orang banyak, Pak, dan saya rasa jangan sampai kalau memang indikasi ini benar terjadi, tentu ini mendekati praktik-praktik Romusa, Pak.

Kan aplikasi ini kan sudah mendapatkan keuntungan dari pihak-pihak lain kan, mungkin dari pembelinya atau mungkin dari *tenant*-nya. Nah, yang dari ojek *online*-nya ini, harapan kami, potongannya sesuai dengan yang telah disepakati, Pak, supaya mereka ini bisa, apa ya, taraf hidupnya juga bisa lebih meningkat dan bisa menekan juga angka pengangguran atau kemiskinan. Saya *nitip*, Pak, ini mungkin bisa dibahas di rapat kabinet.

Kira-kira dua poin itu saja, Pak Rosan dan juga Pimpinan.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

*Waalaikumsalam,*

Terima kasih, Mas Hakim.

Saya panggil Mas, biar publik tahu kalau masih *single*.

Baik, pendalaman sudah selesai, Pak Menteri. Silakan, Pak Menteri memberi tanggapan secukupnya. Tidak perlu semuanya ditanggapi, nanti sebagiannya tertulis, apalagi yang menyangkut data persisi mungkin bisa tertulis. Lebih valid *lah* kalau tertulis.

Silakan, Pak Menteri.

**MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (ROSAN PERKASA ROESLANI):**

Terima kasih.



**Pimpinan, dan juga  
Anggota Dewan yang terhormat,**

Atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada kami. Dan saya mungkin tidak menjawab satu persatu, tapi karena saya lihat banyak sekali pertanyaan yang beririsan, yang sama. Jadi, saya akan menjawab itu, dan juga mengenai data-data, nanti kita akan, apa, masukkan juga secara tertulis.

Tapi pada intinya memang investasi yang kita harapkan ke depannya adalah melihat juga ini sangat beririsan dengan tren dari investasi yang masuk, baik dari segi pembiayaan, baik dari segi industri, dan juga dari segi peningkatan sumber daya manusianya. Kebetulan, saya juga baru kembali dari Singapura dan bertemu juga dengan beberapa perusahaan yang telah berinvestasi di Singapura, dan juga, apa, baik pemerintahan tertingginya juga menyempatkan bertemu dengan kami.

Saya sempat bertemu dengan, dikasih waktu, bahkan bertemu dengan para *minister*-nya, karena mereka sangat senang bertemu dan kita bertukar pikiran. Memang kalau kita lihat tadi beberapa masukan, memang dengan adanya ketegangan geopolitik antara US sama China ini, kalau kita lihat kita ini salah satu penikmat tapi bukan yang paling besar, masih ada Vietnam, ada Malaysia, ada Thailand, yang lebih banyak menikmati perpindahan investor ke negara-negara tersebut. Kalau kita lihat lebih lagi, kita telusuri lagi, itu kenapa? *Gitu* ya. Salah satunya memang hal yang harus selalu kita sempurnakan dari segi, apa, kemudahan berusaha, perizinan, kepastian hukum, istilah mereka itu *rule of law*-nya ini, itu salah satu PR kita.

Dan juga yang menarik adalah mereka bilang, di kita ini investasi yang ada itu diharapkan energinya itu dari energi baru terbarukan atau *clean energy*. Nah, mungkin saya bandingkan dengan Vietnam. Di Vietnam, itu untuk *industry* apa, *industrial part*-nya, untuk kawasan ekonominya, itu kebanyakan sudah lebih dari 62% itu dengan tenaga, apa, dengan tenaga *clean energy*, hidro, solar, apa, tenaga surya, tenaga angin, dan yang lain-lain. Karena itu adalah permintaan atau *demand* dari global.

Karena, saya contohkan mungkin Tesla, kebetulan saya *involve* langsung dalam, apa, pembicaraan dengan Tesla. Salah satu yang mereka mengalihkan investasinya bukan ke kita karena mereka bilang, "Kita sebagai *EV car*, tentunya semuanya ingin bersih", istilah mereka. Tetapi, kalau mereka masuk ke kawasan industri di kita, tetapi energinya masih dari *fossil fuel*, *based* energi *kayak fuel*, ini *gak inline* dengan, dengan ininya mereka, dengan visinya mereka. Nah, ini yang kita tidak bisa *pungkiri*, ke depannya akan seperti itu. Nah, kita ini mohon maaf, memang agak tertinggal, *gitu*.

Saya contohkan satu *company* di Singapura, SEMBCorp. Dia sudah punya tiga, hanya dari SEMBCorp saja, dia sudah punya 13 di Vietnam, kawasan ekonomi di Vietnam. Dia akan buka lagi sampai 18, dalam waktu tiga bulan ke depan. Dari situ, sebagian besar sampai 70% bertenaga, apa,



*renewable energy* atau *clean energy*. Sehingga investasi yang ke Vietnam itu lebih deras *lah*, istilah saya, *gitu*. Nah, ini yang salah satu PR yang mesti kita ini, mesti kita *address*, mesti *analisa*.

Dan saya sudah duduk dengan tim, saya bilang, kita lihat saja ini, kita kan ada beberapa kawasan ekonomi khusus juga, yang *gak* jalan juga. Kita sudah *review* kurang lebih ada enam, ya? Yang kurang berjalan. Kenapa itu kita tidak bicarakan dengan *inisiatoris* ini untuk dikerjasamakan dengan investor luar.

Yang kedua adalah, ini mereka bilang *talent of pool*. Jadi, apa *talent of pool*? SDM-nya, ini kita juga masih kurang, *gitu*. Dan mereka bilang ...

**F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):**

Izin, Pak.

Kurang mampu, apa kurang jumlah?

**MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (ROSAN PERKASA ROESLANI):**

Dari segi kemampuan, Ibu, kalau jumlah itu ada. Oleh sebab itu, mereka juga mengusulkan untuk apakah soal ekonomi khusus yang mereka bangun di banyak negara, ini sekarang berdampingan juga dengan seperti politekniknya mereka bangunkan juga.

Nah, ini mungkin yang belum ada, belum ada di kita, sehingga secara keseluruhan pembangunan sumber daya manusia kita juga meningkat. Jangan industri yang meningkat, tapi sumber daya manusia kita *nggak* meningkat. *Kan* itu tidak akan menyebabkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkesinambungan, seperti itu. Nah, ini PR-PR yang kita sudah kita lihat, walaupun saya baru dua minggu di sini, tapi kita *ngejanya* bisa *nggak*? Bisa, *gitu*. Saya yakin bisa. Dengan target yang ditargetkan bisa kita capai, ya saya bilang, "Kita harus yakin dengan target yang dicanangkan ini".

Memang kita ingin ini proaktif. Kita mesti proaktif, Bu, terus-terang. Karena banyak juga kebijakan dari kita yang sebetulnya bagus, yang sebetulnya baik. Tapi mereka *nggak* dengar, *nggak* sampai, karena kita tidak menyampaikan itu. Contohnya, kalau perusahaan asing atau perusahaan lokal ikut dalam, apa, memberikan pendidikan vokasi, itu *kan* dapat insentif pajak, bisa dipotong sampai 200%. Tidak tersosialisasi, Bu, tidak tersosialisasi. Padahal sudah, *gitu*.

Dan kalau *company* juga melakukan *research and development* di Indonesia, mendapatkan juga *tax* insentif 300%. Undang-undangnya sudah ada. Peraturan turunan sudah ada. Tapi mereka *nggak* tahu. Malah waktu saya berbicara dengan perusahaan-perusahaan Singapura yang sudah



berinvestasi di Indonesia, mereka pun *nggak* tahu, mereka kaget. Sejak kapan? Mereka bilang. "Oh ini sudah ada sejak dua tahun yang lalu".

Tapi itu, kebijakan kita yang sudah baik, kadang-kadang tidak tersosialisasi dengan baik. Jadi, apa, ya, sayang, *gitu*, Nah, ini yang, hal-hal seperti ini *kan* kita bisa mendengar, karena apa? Karena kita proaktif, *gitu*. Kita datang, kita ajak bicara, *gitu*. Jadi, ini juga hal yang berhubungan dengan ya mungkin berhubungan dengan anggaran juga, kita mesti aktif. Karena kita juga mesti ingat, bahwa kita ini, ya kita *compete* juga ini. Kita bersaing dengan negara-negara tetangga kita. Kita bersaing itu. Ya, kita kalau kumpul, ya teman *gitu*, negara Asia, tapi bersaing, bersaing benar, *gitu*. Karena, apa, dan persaingan ini akan terus berjalan. Dan di saat bersamaan mereka melakukan banyak kebijakan, reformasi di peraturan, di kebijakan, di regulasi, yang intinya mengundang investor yang berkualitas dan yang kita inginkan juga yang berorientasi ekspor, *gitu*. Dan penciptaan lapangan pekerjaan, sehingga sumber daya manusia kita juga makin meningkat ke depannya, *gitu*.

Dan saya juga sudah sampaikan mungkin ini, bahwa untuk di Kementerian Investasi, kita *tuh* harus transparan, harus terbuka, dan *governance* itu paling penting. Buat saya itu, *governance*, tata kelola itu paling penting, *gitu*. Kalau semua sudah sesuai dengan aturan, sesuai dengan, apa, kebijakan, izin kita keluarkan. Jangan ada yang dipersulit, saya bilang *gitu*, kita keluarkan. Asal sesuai dengan peraturan yang ada ya, itu *kan* penting, *gitu*. Dan ini kita lakukan secara terbuka, karena investor itu, baik dalam maupun luar negeri, satu, mereka tidak suka ada kejutan, *surprises*. Jadi, semuanya mereka *pengen* terukur dan terstruktur. Itu *kan* seperti itu.

Dan penciptaan lapangan pekerjaan, ya itu menurut kami juga adalah PR yang paling utama buat kita. Kita setahun melahirkan bayi itu 2,5 juta orang, setiap tahun. Jadi, setiap dua tahun sekali kita melahirkan satu Singapura, saya bilang. Singapura *kan* penduduknya 5,5 juta *lah*. Jadi, setiap dua tahun kita melahirkan satu Singapura. Kalau misalnya penciptaan lapangan pekerja tidak kita lakukan, nah, ini akan menjadi suatu masalah ke depannya yang sangat besar. Nah, penciptaan lapangan pekerja itu bisa dapat dengan apa? Kalau ada investasi masuk, baik itu investasi dalam negeri maupun investasi dari luar negeri. Nah, Oleh sebab itu, ya kita tentunya dari kami, Kementerian Investasi, akan terus menyempurnakan peraturan ada, kebijakan ada, termasuk OSS (*Online Single Submission*).

Terus-terang, kami akui memang masih banyak kekurangan-kekurangannya. Karena kami ini, iya, Bu. Karena satu hal juga yang kalau boleh saya *sharing*, Ibu, karena kami ini lebih banyak di depannya, di *front end*-nya. Jadi, untuk mendapatkan perizinannya, tetap kami harus menunggu dari kementerian terkait, ada 18 kementerian. Nah, karena verifikasinya ada di kementerian, walaupun sudah ada kesempatan SLA-nya, ya? Misalnya di kementerian tersebut, tiga hari harus selesai, atau lima hari harus selesai, tujuh hari harus selesai.

Tapi dalam kenyataannya ini, itu sering sekali tidak sesuai dengan yang sudah tertuang. Yang kami pikirkan untuk semua itu tetap sesuai adalah kita sebetulnya akan menyampaikan surat di dalam waktu dekat ke 18 kementerian terkait itu dari kami, bahwa mereka harus, harus apa, melakukan sesuatu sesuai dengan kesepakatan hari yang sudah disepakati. Kalau tidak, otomatis izinya harus sudah keluar.

**F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):**

Pak, izin, Pak.

Menurut saya, ini penting, Pak, OSS ini, karena saya cukup prihatin, ya. *Udah* 5 tahun saya di Komisi VI ini *nggak* jalan. Jadi, kalau dibilang sudah jalan, itu bohong, belum jalan ini OSS ini, *gitu*. *Enggak, enggak* sempurna, *gitu*.

Maksud saya, kan Bapak sudah tahu *nih* masalahnya, bahwa koordinasi dengan lintas departemen terkait ini yang menghambat. Kenapa Bapak *nggak* bikin gugus tugas, Pak? Di dalamnya itu departemen-departemen, tapi *under your control, gitu lho*, Pak. Jadi, memang dibikin satu komite kah, apa *kek* namanya, yang diisi operasionalnya itu adanya di Kementerian Investasi, Pak. Tapi orang-orangnya, itu mereka menempatkan orang-orang mereka. Jadi, target satu hari, ini satu hari, karena orangnya itu ada di situ, Pak. Saya rasa perlu dipikirkan untuk membuat, apa namanya, komite atau gugus tugas itu, *gitu*. Satu atap, *gitu lho*, Pak. Harusnya itu yang dilakukan. Karena namanya *single submission* itu *kan* tujuannya kan mempercepat, ya *kan*? Kalau ini 18 instansi, *tapi enggak* ini, 5 tahun lagi saya di Komisi VI, *enggak* bakal beres-beres.

Terima kasih, Pak.

**F-PDIP (Prof (Assc) Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):**

Pimpinan, sedikit.

**KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Ya, sedikit.

**F-PDIP (Prof (Assc) Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):**

Sedikit.

Pimpinan, saya pikir *gini*, Satgas Investasi ini harus diefektifkan. Karena yang dulu, *nggak* berdaya, Pak. Misalnya ada investor ini, lapor ini, Pak Rosan. Ini betul ini, cerita benar ini, ya. Kadang-kadang tidak berdaya, Pak, untuk menyelesaikan masalah yang ada. Kenapa, kalau ditanya? Ya

*enggak enak hati, Pak, enggak enak hati. Nah, yang kayak gini nih gak boleh, orang berhubungan dengan investasi kok.*

Ya, Bapak nanti harus bicara dengan Presiden Prabowo Subianto, bosnya Hekal *nih*. Ini ada yang menghambat, *loh*, Pak, ya. Makanya I-Core-nya kenapa bisa tinggi? Buruk, *gitu*, Pak. Jadi, kadang saya bertanya, ini *kok* “*Enggak enak hati lah, Pak*”, jawabannya, investor mati *duluan*, Pak, yang kayak *gini*. Nah, tolong diefektifkan, bagaimana caranya? Kuat *nggak*, Pak, Satgas Investasi itu? Kuat sekali, Pak. Bapak kepalanya, kalau *nggak* salah wakilnya itu Wakil Jaksa Agung sama Wakapolri. Kuat sekali, Pak. Nah, ini tolong dievaluasi dan diefektifkan. Misalnya *nih*, peraturan ini izinnya *kok* *nggak* keluar, kenapa? Ada yang bermain, Pak. Ada yang bermain, sebenarnya tahu, tahu ini yang bermain siapa, tapi *enggak* berani masuk. Nah, hal-hal seperti ini, mohon, Pak Rosan, saya tahu, kami menaruh harapan besar sama Bapak, *gitu*. Nah, hal-hal ini harus mohon diperhatikan.

Begitu, Pak, kira-kira.

**KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Baik, cukup ya.

Pak Rosan, masih ada yang mau disampaikan?

**MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI (ROSAN PERKASA ROESLANI):**

Terima kasih, Pimpinan.

Cukup, inputannya sangat baik. Ya cukup, Pak.

Terima kasih.

**F-PD (Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):**

Saya kira fokus kepada ini saja, keputusan anggaran dulu, ya.

**KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Baik. Karena mau fokus di keputusan anggaran, saya bacakan saja kesimpulannya. Tolong ditayangkan, normatif saja semuanya. Kita membaca ini dengan kesedihan yang mendalam, Pak. Baik, tolong ditampilkan agak besar. Saya bacakan poin per poin.

1. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan Menteri Investasi/Kepala BKPM RI dan mengapresiasi, ini kita apresiasi, Pak, Realisasi Anggaran Kementerian Investasi/BKPM RI yang sampai 31 Agustus 2024 telah mencapai 64,53%, serta mendorong



Kementerian Investasi/BKPM RI untuk meningkatkan Realisasi Anggaran Tahun 2024 agar tercapai target-target yang telah ditetapkan.

Oke, ya?

**(RAPAT : SETUJU)**

Ini termasuk besar ini, Agustus sudah 64,53.

2. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Menteri Investasi/Kepala BKPM RI terkait Pagu Anggaran Kementerian Investasi/BKPM RI tahun 2025 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan Nomor S, sekian-sekian, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor B, sekian-sekian, yang ditetapkan sebesar Rp681.880.285.000,00 (*Enam Ratus Delapan Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah*) dengan perincian:
  - a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp359.485.931.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah*).
  - b. Program Penanganan Modal sebesar, Program Penanaman Modal sebesar Rp322.394.354.000,00 (*Tiga Ratus Dua Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah*)

Setuju ya?

**(RAPAT : SETUJU)**

3. Komisi VI DPR RI menyetujui usulan penambahan anggaran Kementerian Investasi/BKPM RI Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp681.880.285.000,00 (*Enam Ratus Delapan Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah*) untuk kebutuhan prioritas yang belum diakomodir.

Angkanya? Silakan.

**F-PD (Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):**

Beda, *kayaknya* ini. Itu anggarannya yang di pagu anggaran, Pak Ketua. Usulan kebutuhannya 889.

**KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**



Oh, iya.

**F-PD (Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):**

Kalau bisa sih usulan itu 2 triliun *lah, gitu* ya.

**KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Angkanya itu, angkanya salah *kayanya*. Angkanya 800 itu. Itu yang pagu itu, yang 600 itu. Ya, di 889 itu, 889 itu.

Diperbaiki, ya. Setuju ya, tapi ya.

**(RAPAT : SETUJU)**

4. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Menteri Investasi/Kepala BKPM RI terkait program penerbitan NIB-OSS (Nomor Induk Berusaha-*Online Single Submission*) periode 4 Agustus 2021-31 Agustus 2024.
5. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian Investasi/BKPM RI untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu 5 (lima) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

Setuju, Pak Menteri?

**(RAPAT : SETUJU)**

Baik, dengan dibacakannya kesimpulan tadi, selesai sudah rapat kerja kita kali ini. Kita berharap benar, mudah-mudahan tambahan anggarannya disetujui, Pak Menteri, supaya bisa bernafas lega, supaya paling *enggak* perwakilan-perwakilan di luar negeri bisa terselamatkan. Karena saya tahu betul beberapa bagus, seperti Singapura itu bagus dan sangat diperlukan, kalau anggarannya *nggak* ada, itu kemerosotan menurut kami.

Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirrahmanirrahim*, Pak Menteri, mau ada *closing statement*? Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirrahmanirrahim*, rapat ini kami tutup.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.26 WIB)**

a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,

TTD.

**DEWI RESMINI, S.E., M.Si.**  
NIP. 197104071992032001

